

Monitoring Issue of Food, Energy, and Sustainable Development

**Menakar Risiko Fiskal di Balik Ambisi
Transisi Energi dan Ketahanan Pangan Nasional**

September 2026



Monitoring Issue of Food, Energy, and Sustainable Development

Menakar Risiko Fiskal di Balik Ambisi Transisi Energi dan Ketahanan Pangan Nasional

Abra Talattov
Head of Center

Annisa Utami Kusumanegara **Afaqa Hudaya**
Researcher *Researcher*

Aisyah Nur'aeni **Noval Fauzan**
Research Associate *Research Assistant*

Zulianissa Diah Kusmawati **Pramudya Putra Bintang**
Research Assistant *Research Assistant*

Center of Food, Energy, and Sustainable Development (CFESD)



Ringkasan Eksekutif

Sektor Energi

- Harga komoditas energi global naik tajam, dengan Brent USD91,08/bbl (+34,19% YoY) dan gas Eropa USD21,11/MMBtu (+89,33% YoY), dipicu risiko geopolitik AS-Iran dan ketegangan Timur Tengah.
- Alokasi subsidi energi terus membengkak, dari Rp125,3 T (2020) menjadi Rp272,9 T pada RAPBN 2027, dengan pola *over/under budgeting* berulang yang mencerminkan lemahnya akurasi proyeksi.
- Beban kompensasi energi semester I/2026 melonjak 70% (YoY) ke Rp116,9 T (tertinggi sejak 2022); ditambah subsidi energi, realisasinya mencapai Rp233 T atau 52,1% pagu APBN 2026.
- Distribusi subsidi Pertalite bersifat regresif: dua desil teratas (9 dan 10) menyerap 45,5% dari total subsidi, menegaskan urgensi reformasi skema penyaluran berbasis DTSEN.
- Beban pembelian listrik PLN naik 9,3% (YoY) menjadi Rp195,21 T, berisiko membengkak lebih jauh.
- Program PLTS 100 GWp baru mencapai 0,02% realisasi operasional beberapa hari pasca-peluncuran.
- Substitusi LPG ke CNG masih jauh dari siap: kapasitas CNG terdaftar baru 8,7% dari kebutuhan gas nasional (965 juta kaki kubik/hari), dengan 3 dari 6 wilayah rencana induk belum memiliki fasilitas.

Sektor Pangan

- Tekanan ketahanan pangan meningkat ditandai dengan kenaikan harga pangan global, terutama gula (+11,76% MoM), gandum (+42,80% YoY), dan beras (+23,14% YoY).
- Tekanan domestik menguat, dengan inflasi *volatile food* mencapai 4,06% pada Agustus 2026 didorong lonjakan cabai rawit (+45,68% YoY) dan daging ayam (+16,90% YoY).
- Perunggasan menghadapi persoalan struktural berupa surplus pasokan, lemahnya posisi tawar peternak, disparitas harga, dan disparitas distribusi sehingga perlu dilakukan pembenahan tata kelola rantai pasok.
- Risiko krisis pangan global semakin menguat melalui lima kanal, yaitu *War, Weather, Warehousing, Water, dan Waste* yang berpotensi mendorong inflasi pangan global hingga 5%.
- Ketergantungan bahan baku NPK impor menjadi titik kerentanan, terutama ketika konflik geopolitik mengganggu jalur perdagangan pupuk dan meningkatkan biaya produksi.
- Pascaswasembada beras, tantangan bergeser dari produksi ke penciptaan *exportable surplus* yang konsisten, bernilai tambah, dan memiliki pasar berkelanjutan.
- Kenaikan anggaran ketahanan pangan hingga Rp195,3 triliun pada 2027 perlu diarahkan pada efektivitas, bukan sekadar ekspansi, dengan fokus pada produktivitas, input, distribusi, pendapatan petani, dan stabilitas harga.

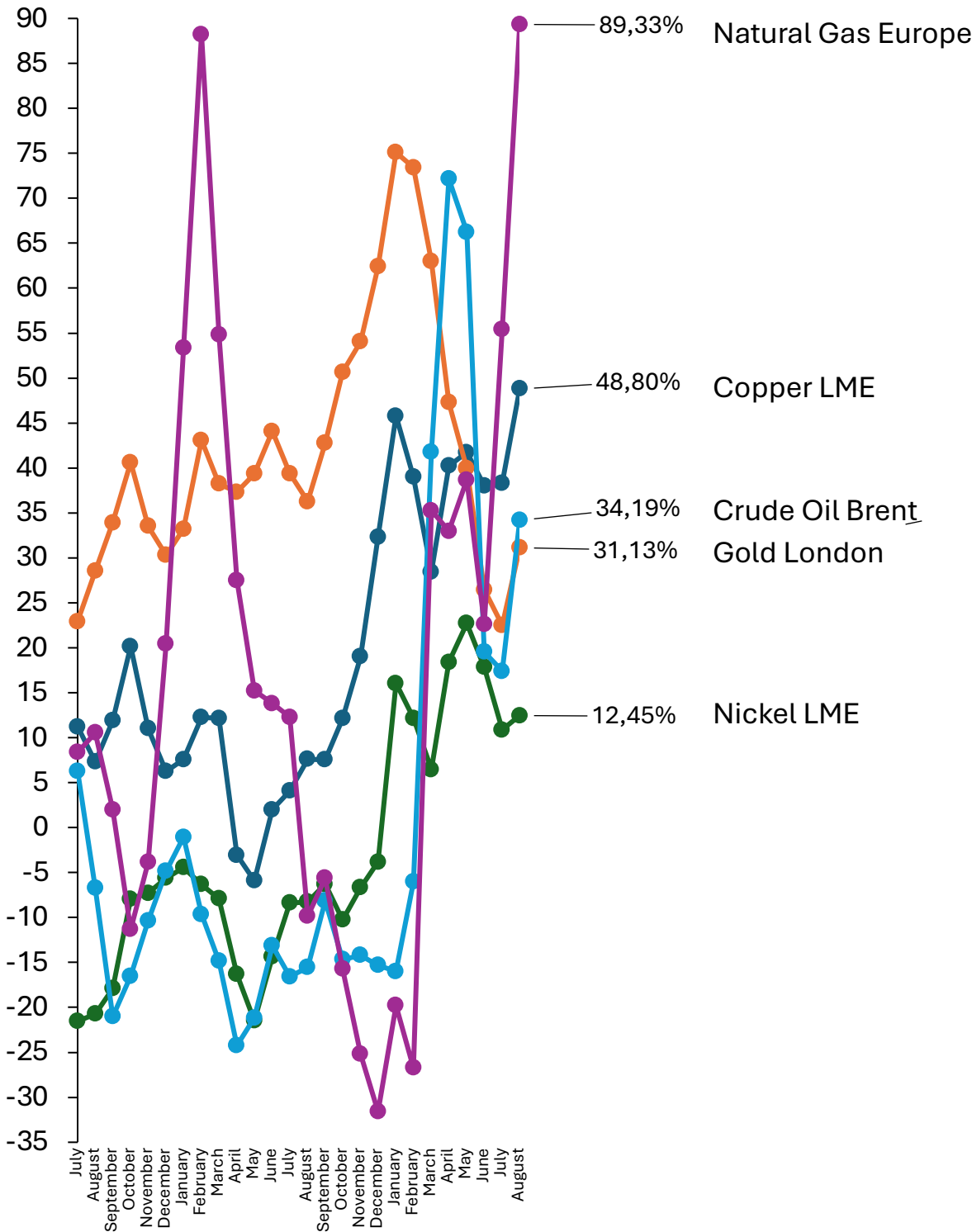


Sektor Energi

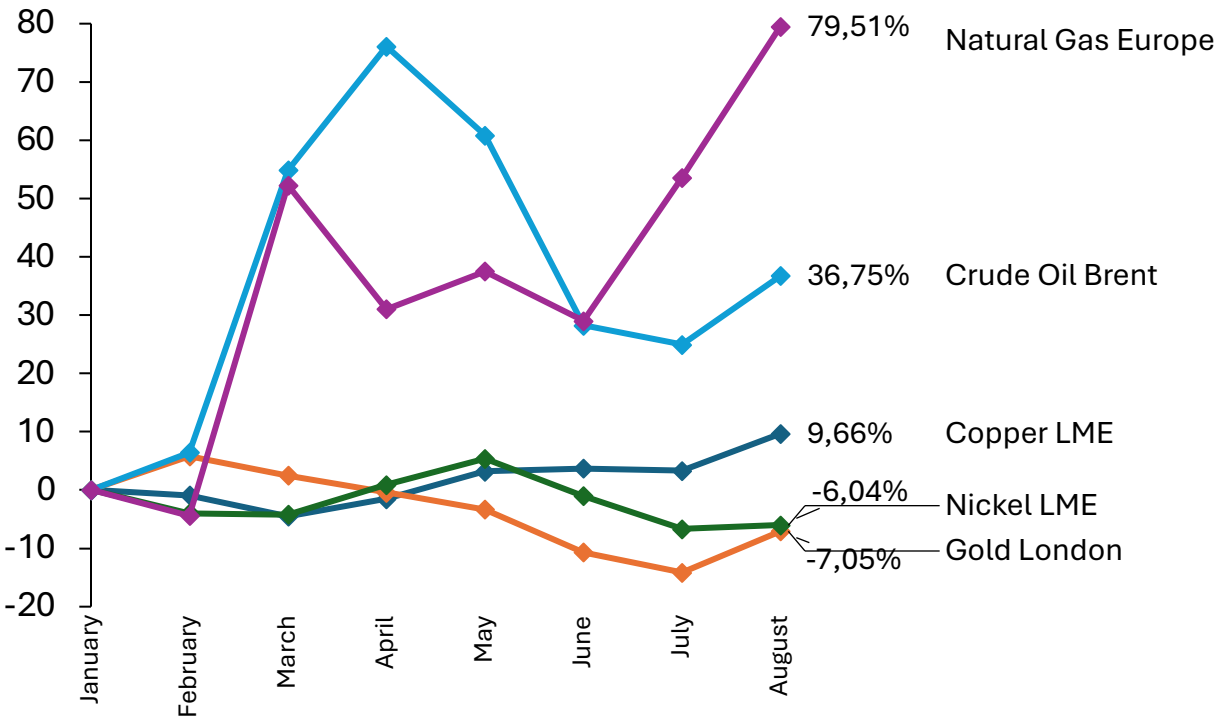


Dinamika Harga Komoditas Global

Commodity Price Growth (%yoy)



Commodity Price Growth (%ytd)



Perkembangan Harga Komoditas Energi (Agustus 2026)

Komoditas	Harga Agustus 2026	%MoM	%YoY	%YtD
Minyak Mentah Brent	\$91,08/bbl	9,47%	+34,19%	+36,75%
Gas Alam (Eropa)	\$21,11/MMBtu	16,89%	+89,33%	+79,51%
Emas (London)	\$4409,9/troy oz	8,25%	+31,13%	-7,05%
Nikel (LME)	\$16.765,75/Tonne	0,65%	+12,45%	-6,04%
Tembaga (LME)	\$14.353,4/Tonne	6,12%	+48,80%	+9,66%

Minyak Mentah

Harga minyak mentah Brent Agustus 2026 tercatat USD 91,08/bbl, tumbuh 34,19% (YoY) dan 9,47% (MoM). Peningkatan harga secara bulanan didorong oleh meningkatnya risiko geopolitik AS-Iran dan ketidakpastian akses melalui Selat Hormuz.

Gas Bumi

Harga gas alam Eropa (TTF) Agustus 2026 tercatat USD 21,11/MMBtu, tumbuh 89,33% (YoY) dan 79,51% (YtD). Kenaikan ini turut dipengaruhi sentimen pasar gas global, termasuk data stok AS yang lebih kecil dari perkiraan dan prospek cuaca panas berkepanjangan.

Tembaga

Harga tembaga LME Agustus 2026 tercatat USD 14.353,4/Tonne, tumbuh 48,80% (YoY) dan 9,66% (YtD). Kenaikan ini didorong tantangan pasokan, termasuk larangan ekspor Kongo, pelemahan produksi Chile dan Peru akibat cuaca ekstrim, serta ketidakpastian tarif yang memperketat pasokan global.

Nikel

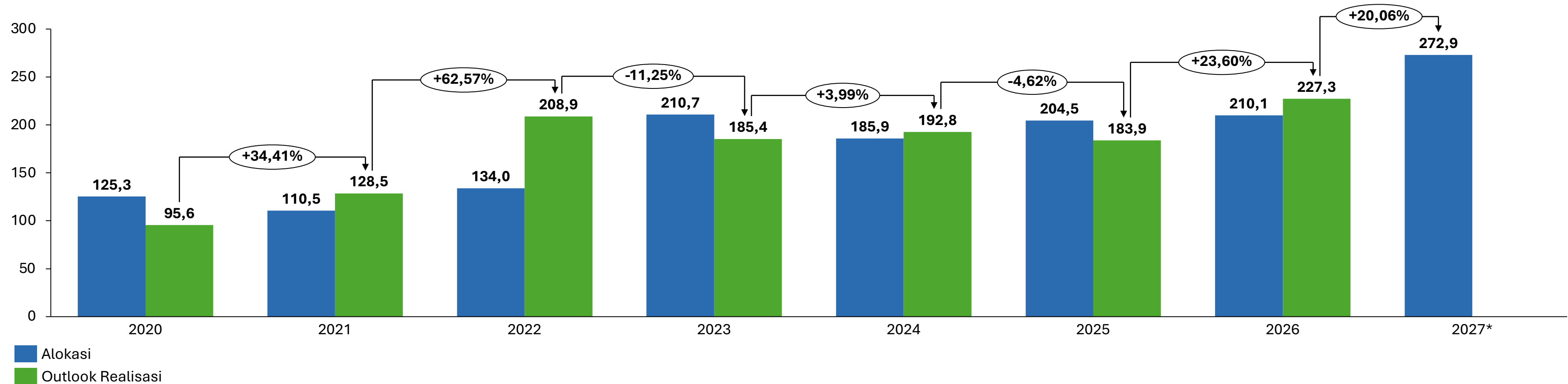
Harga nikel LME Agustus 2026 tercatat USD 16.765,75/Tonne, Naik 12,45% (YoY) dan naik 0,65% (MoM). Hal ini dipicu kekhawatiran ketatnya pasokan global, mulai dari potensi pemangkas produksi IMIP akibat kelangkaan air El Niño, rencana pemangkas produsen HPAL China, hingga pengetatan kuota tambang Indonesia 2026.

Emas

Harga emas London Agustus 2026 tercatat USD 4409,9/troy oz, masih tumbuh 31,13% (YoY) dan naik 8,25% (MoM). Ini didorong sinyal dovish The Fed, pelemahan dolar AS, serta ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Tren Alokasi dan Outlook Realisasi Subsidi Energi 2020-2027

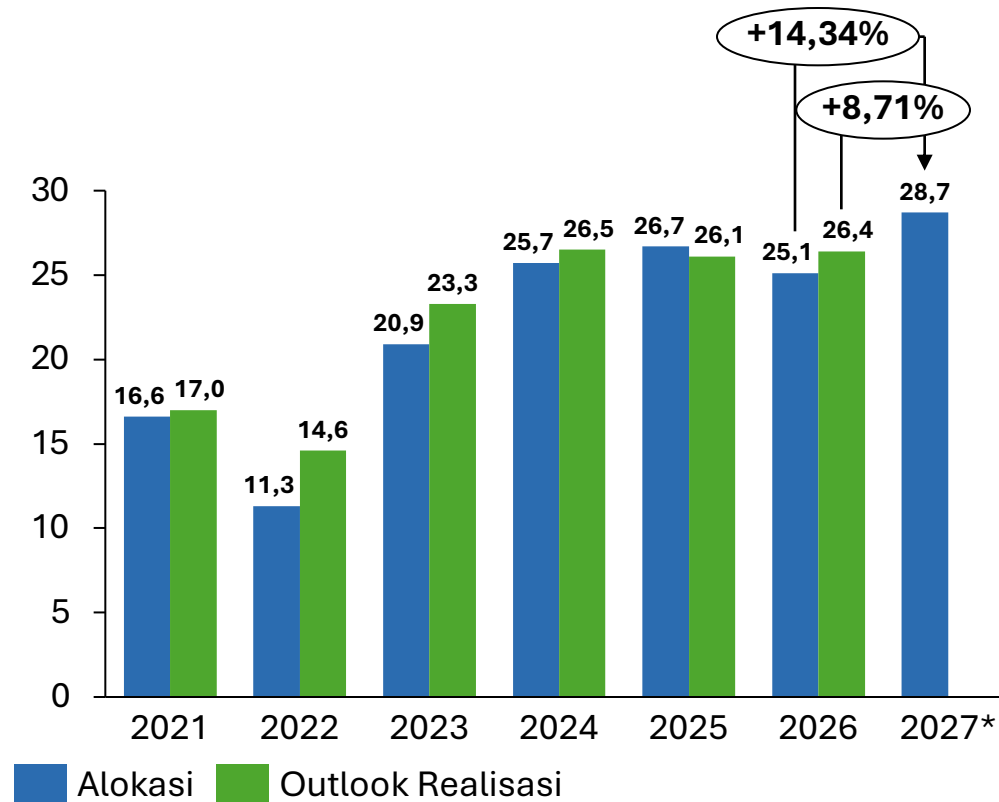
Total Alokasi dan Outlook Realisasi Belanja Subsidi Energi Tahun 2020-2027 (triliun rupiah)



- Selama periode 2020-2027, alokasi subsidi energi (BBM, LPG, dan listrik) tumbuh dari Rp125,3 triliun menjadi Rp272,9 triliun pada RAPBN 2027, naik lebih dari dua kali lipat dalam kurun waktu delapan tahun. Dibalik peningkatan ini, hal yang lebih mencerminkan tantangan kebijakan adalah selisih berulang antara alokasi awal dengan realisasi. Pada tahun 2020, 2023 dan 2025 outlook realisasi justru lebih rendah dari alokasi yang mengindikasikan *over budgeting*. Sementara pada tahun 2021, 2022, 2024 dan 2026 outlook realisasi melampaui alokasi sehingga mengalami *under budgeting*. Dimana, tahun 2022 menjadi titik paling ekstrim.
- Pada tahun 2027, alokasi subsidi energi ditetapkan paling tinggi, yaitu sebesar Rp272,9 triliun atau meningkat 20,11% dibandingkan outlook realisasi tahun 2026. Ini disebabkan oleh pergerakan asumsi dasar makro, khususnya fluktuasi harga minyak mentah dan nilai tukar rupiah yang melampaui proyeksi awal. Selain itu, volume penyaluran subsidi energi juga direncanakan meningkat dari tahun sebelumnya sehingga turut mendorong kebutuhan anggaran subsidi. Di tengah peningkatan tersebut, ketepatan sasaran penyaluran menjadi semakin penting untuk memastikan kenaikan anggaran benar-benar memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Salah satu upaya yang tengah diwacanakan adalah penggunaan data desil kesejahteraan sebagai acuan dalam penyaluran subsidi energi, sehingga penerima subsidi dapat ditargetkan secara lebih spesifik berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

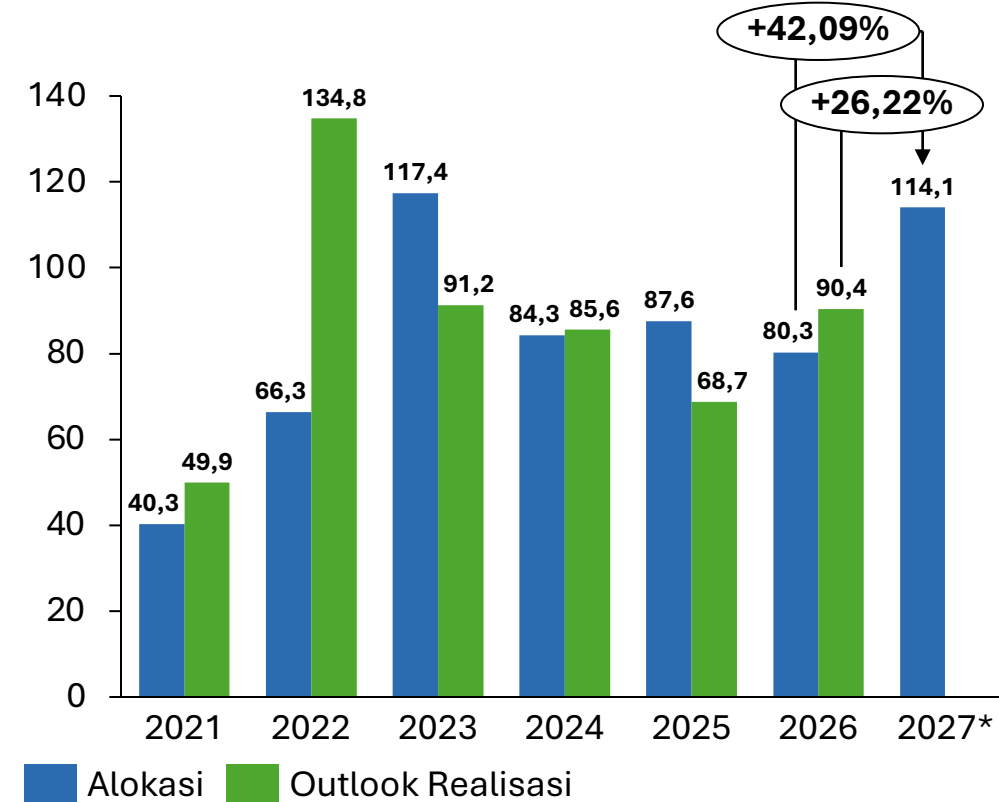
Lonjakan Alokasi Subsidi Energi Tahun 2027: Tekanan Makro dan Reformasi Sasaran

Total Alokasi dan Outlook Realisasi Subsidi BBM Tertentu Tahun 2021-2027 (triliun rupiah)



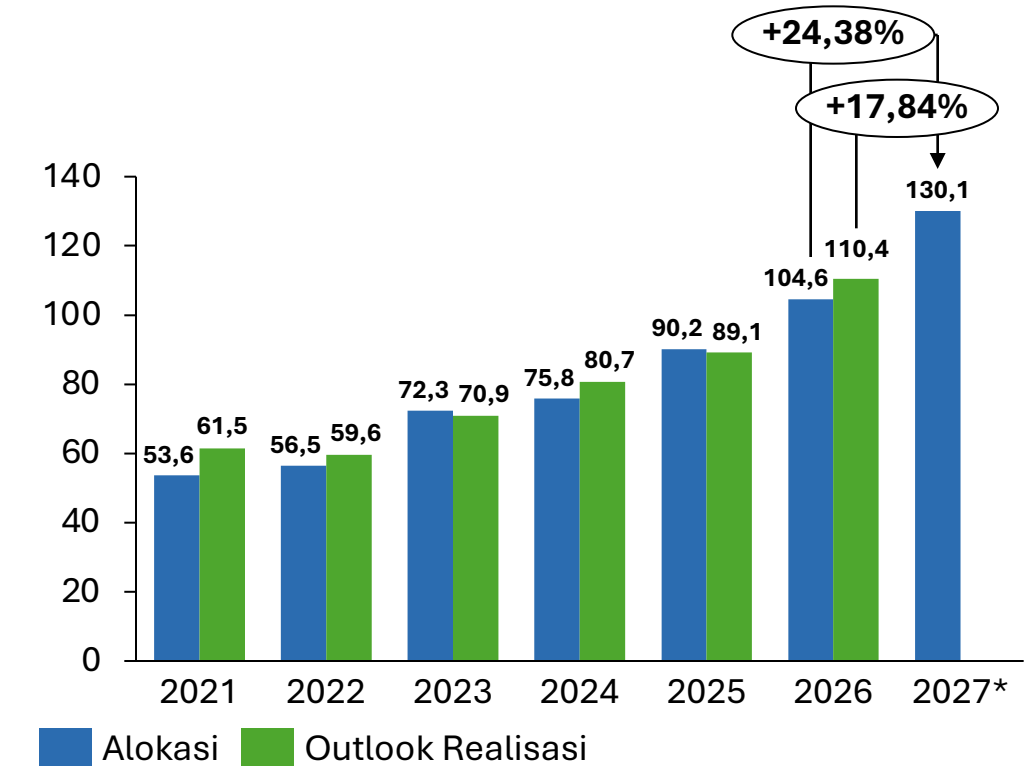
- Pada 2026, alokasi subsidi BBM tertentu ditetapkan sebesar Rp25,1 triliun, dengan outlook realisasi naik menjadi Rp26,4 triliun. Alokasi 2027 diusulkan naik 14,34% menjadi Rp28,7 triliun dari alokasi yang diusulkan tahun 2026, mempertimbangkan fluktuasi kurs rupiah dan Indonesian Crude Price (ICP), skema subsidi tetap solar Rp1.000/liter, serta peningkatan volume solar dan minyak tanah bersubsidi. Subsidi BBM ini juga dibayangi wacana pembatasan akses Peralite berdasarkan desil DTSEN, yang berpotensi mengubah signifikan siapa yang berhak menerima subsidi ini ke depan.

Total Alokasi dan Outlook Realisasi Subsidi LPG 3 kg Tahun 2021-2027 (triliun rupiah)



- LPG 3 kg mencatat lonjakan alokasi paling tajam. Pada 2026, alokasi Rp80,3 triliun meleset cukup jauh dari outlook realisasi yang diperkirakan mencapai Rp90,4 triliun. Alokasi 2027 diusulkan melonjak 42,09% menjadi Rp114,1 triliun, didorong asumsi makro (harga minyak mentah dan kurs rupiah) serta peningkatan volume kuota penyaluran LPG 3 kg. Lonjakan ini juga beriringan dengan percepatan transformasi subsidi LPG 3 kg menjadi berbasis penerima manfaat terintegrasi DTSEN, mengindikasikan kebutuhan anggaran yang masih tinggi selama proses transformasi basis data berjalan.

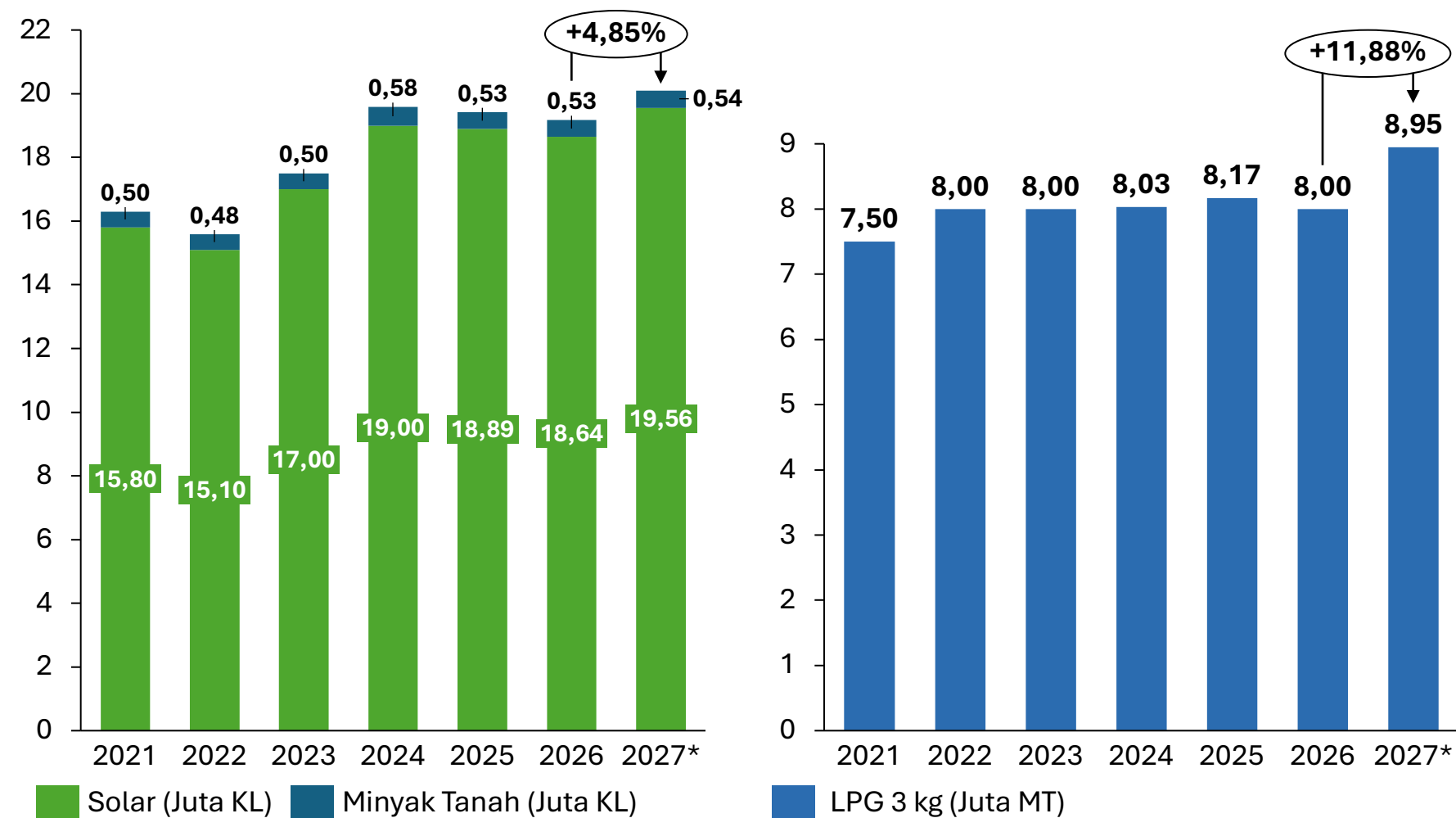
Total Alokasi dan Outlook Realisasi Subsidi Listrik Tahun 2021-2027 (triliun rupiah)



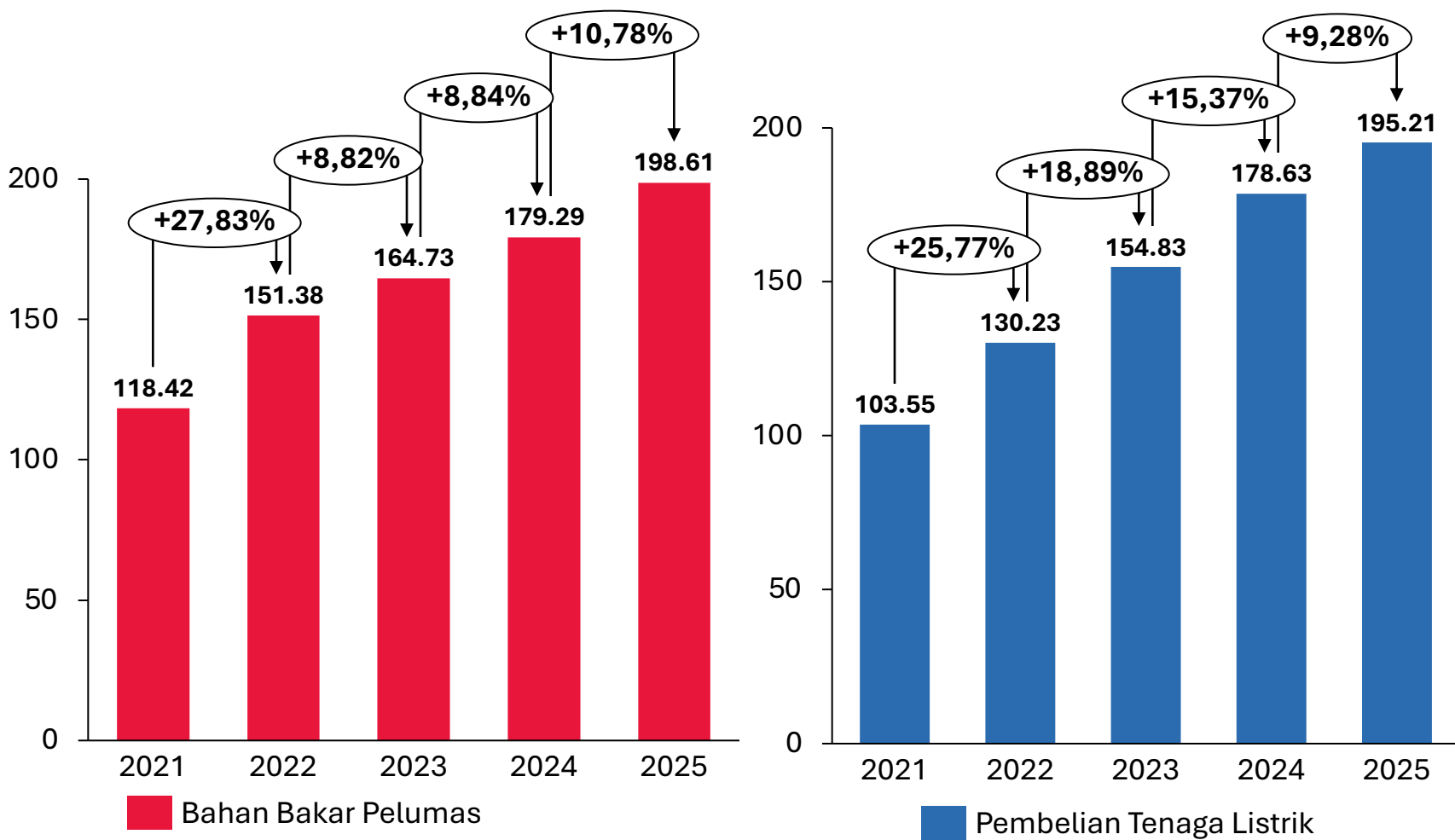
- Alokasi subsidi listrik tahun 2027 direncanakan sebesar Rp130,1 triliun, naik 24,38% dari alokasi tahun 2026. Peningkatan alokasi ini dipengaruhi oleh peningkatan biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik serta peningkatan volume listrik bersubsidi. Kenaikan ini berjalan beriringan dengan kebijakan penyesuaian tarif (*tariff adjustment*) bagi pelanggan nonsubsidi dan pengetatan sasaran rumah tangga miskin/rentan berbasis DTSEN.

Pendorong Subsidi Energi: Antara Volume dan Biaya Penyediaan

Volume Kuota Alokasi Pemberian Subsidi BBM Tertentu dan LPG 3 kg



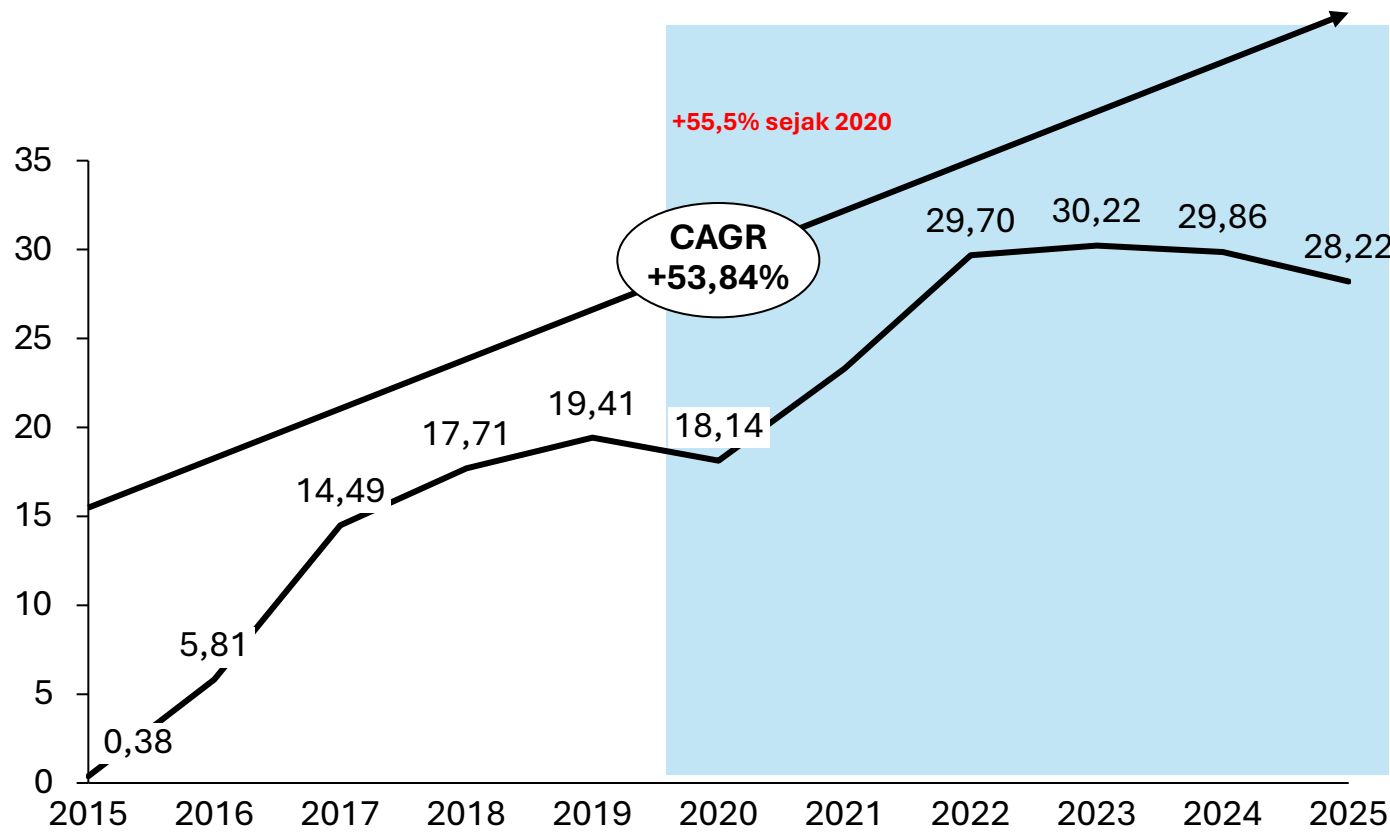
Biaya Bahan Bakar Pelumas dan Pembelian Tenaga Listrik (dalam Triliun Rupiah)



- Volume kuota subsidi BBM tertentu dan LPG 3 kg cenderung meningkat sepanjang 2021-2027. Pada tahun 2027 volume kuota alokasi subsidi BBM tertentu naik 4,85% dari tahun 2026. Solar bersubsidi menjadi kontributor utama, naik dari 18,64 juta KL pada tahun 2026 menjadi 19,56 juta KL di tahun 2027. Sementara itu, volume minyak tanah subsidi relatif stagnan di angka 0,5 juta KL. Di sisi lain, volume LPG 3 kg juga mengalami peningkatan sebesar 11,88% dari tahun 2026 menjadi 8,95 juta MT pada tahun 2027. Tren ini mengindikasikan bahwa tekanan subsidi energi tidak semata soal harga bahan baku saja, tetapi juga soal basis konsumsi yang terus melebar.
- Biaya penyediaan tenaga listrik yang terdiri dari bahan bakar pelumas dan pembelian tenaga listrik tumbuh konsisten sepanjang 2021 hingga 2025. Kenaikan ini mencerminkan naiknya BPP tenaga listrik, dipicu fluktuasi kurs rupiah, harga ICP akibat konflik geopolitik, dan peningkatan produksi pembangkit gas. Pada tahun 2025 bahan bakar pelumas naik 10,78% dari tahun 2024, sementara pembelian tenaga listrik tumbuh 9,28%. Tren kenaikan ini diperkirakan terus berlanjut hingga 2027, sehingga mendorong peningkatan kebutuhan anggaran subsidi listrik di tahun 2027.

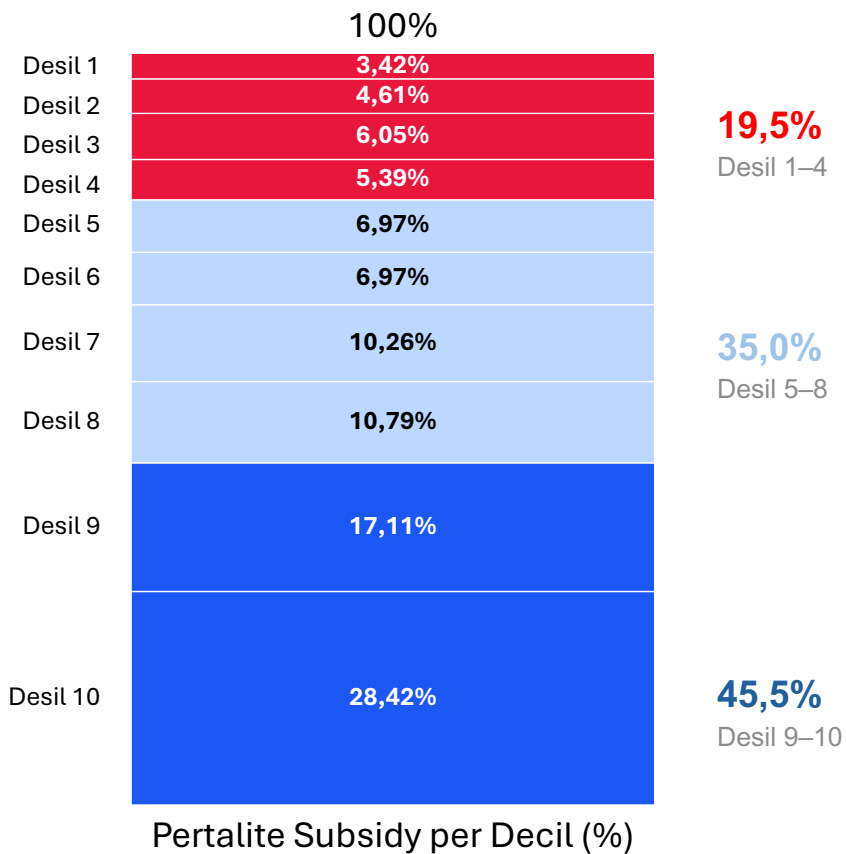
Urgensi Reformasi Subsidi Energi dan Tantangan dalam Penetapan Kelompok Sasaran

Domestic Sales of RON 90 Gasoline (in million kiloliters)



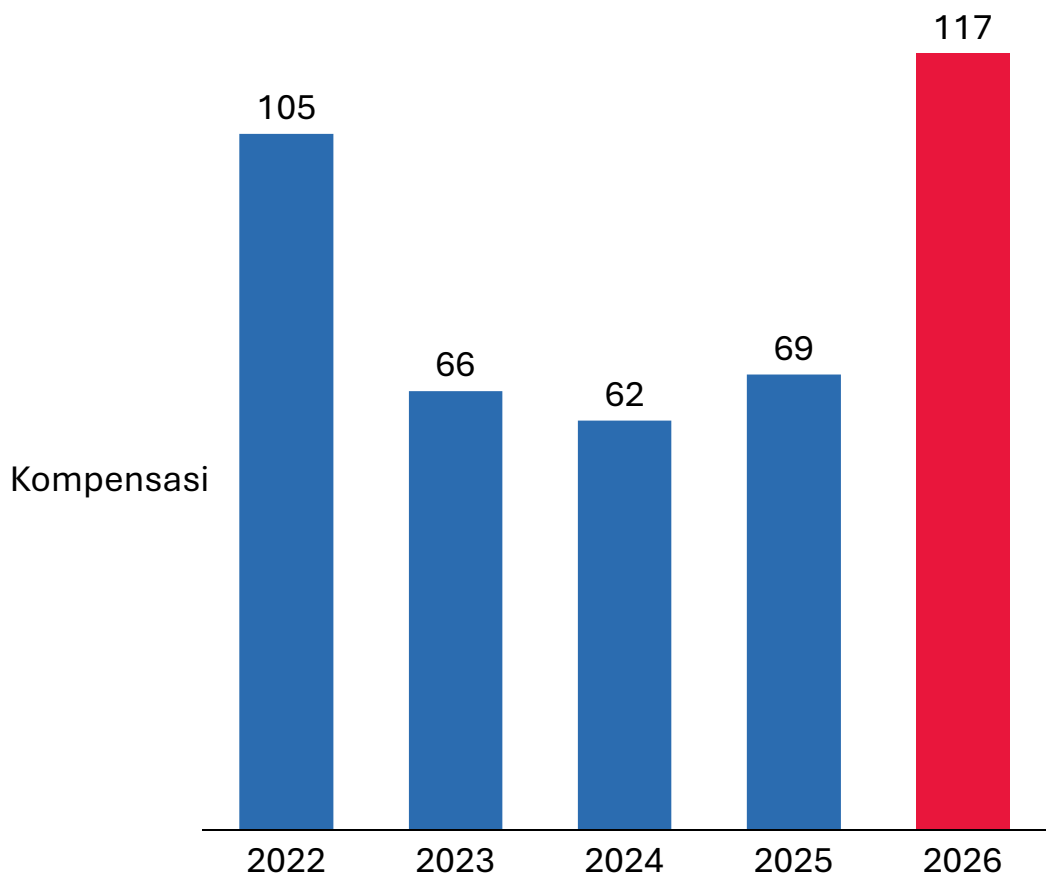
Konsumsi RON 90 atau Pertalite bertahan tinggi sejak 2020, naik dari 18,14 menjadi 28,22 juta kiloliter pada 2025. Koreksi 2024–2025 tidak mengembalikannya ke level sebelumnya dan posisi 2025 masih 55,5% di atas 2020.

Fossil Fuel Subsidy per Decil (%)



Sebaran nilai subsidi Pertalite Rp76 triliun bersifat regresif. Dua desil teratas menguasai 45,53% atau Rp34,6 triliun, sementara desil 1 hanya 3,42%. Besarannya melompat mulai desil 7.

Energy Compensation Disbursements (Rp Trillion, semester I)



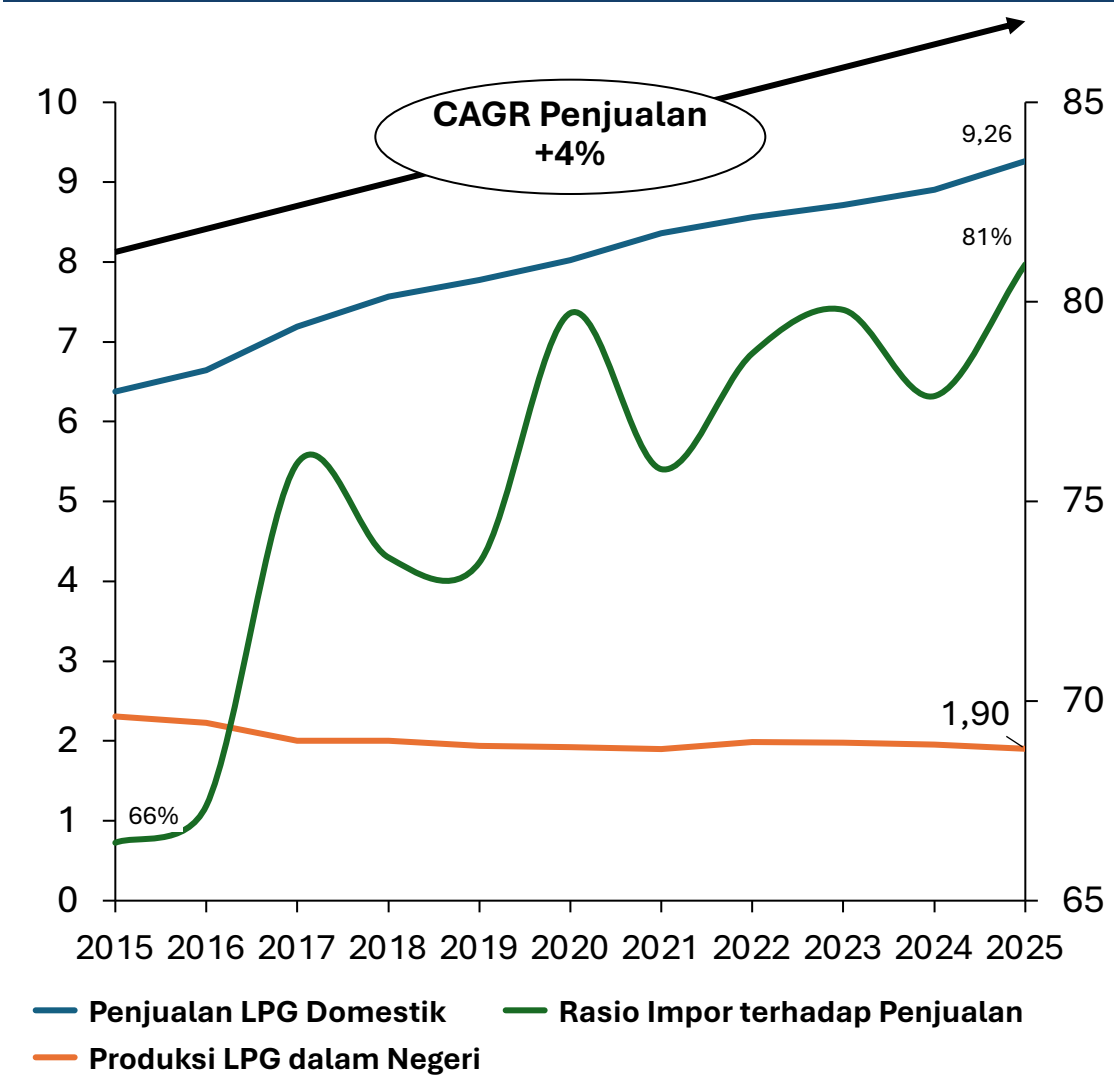
Beban kompensasi semester I melonjak 70% dalam setahun, dari Rp68,6 triliun pada 2025 menjadi Rp116,9 triliun pada 2026, tertinggi sejak 2022.

- Beban kompensasi energi semester I 2026 mencapai Rp116,9 triliun, naik 70% dalam setahun dan tertinggi sejak 2022. Bersama subsidi, realisasinya Rp233,0 triliun atau 52,1% pagu APBN hanya dalam separuh tahun. Selama pintunya terbuka, lonjakan harga minyak langsung menjadi tekanan fiskal. Oleh karena itu, reformulasi subsidi perlu dilakukan dan skema subsidi tertutup bisa menjadi opsinya.
- Penerapan subsidi tertutup tidak bisa memukul rata Desil 9 dan 10. Hal ini karena Desil 10 menyerap 28,42%, yaitu 1,7 kali lipat desil 9 yang menyerap 17,11%. Lebih lanjut, konsumsi riil desil 9 pun hanya tumbuh 1,39% per tahun pada 2019–2025, di bawah nasional 2,31% dan desil 10 yang mencapai 2,82%

Substitusi LPG dengan CNG: Bagaimana dengan Kesiapannya?

Ketergantungan Impor LPG, 2015-2025

Penjualan & produksi dalam juta ton, rasio impor dalam persen

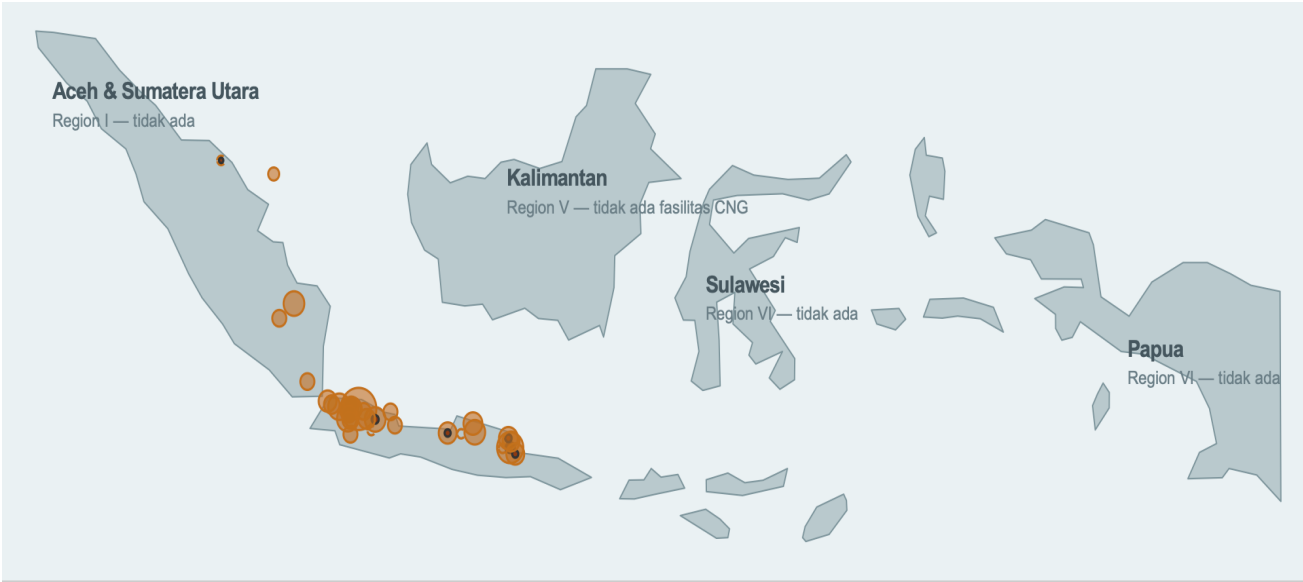


Selama sepuluh tahun terakhir konsumsi LPG domestik naik hampir separuh, dari 6,4 juta ton pada 2015 menjadi 9,26 juta ton pada 2025. Sedangkan produksi bertahan di kisaran 1,9 sampai 2,0 juta ton sepanjang periode itu. Akibatnya, rasio impor meningkat sepanjang periode tersebut.

Faktor pendorong peralihan LPG ke CNG

- Fluktuasi harga komoditas global
- Gas alam Indonesia kaya akan metana (C1)

Kesiapan infrastruktur CNG sebagai pengganti



● Besaran kapasitas station (MMSCFD) ● Titik gelap = ada CNG Storage ○ Hanya kompresor / tanpa station

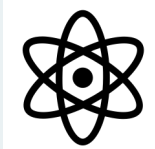
Region	Cakupan Provinsi (Diktum KESATU)	Ketersediaan Fasilitas CNG?	Jumlah Lokasi (Kab/Kota)	Station — total (MMSCFD)	CNG Storage — total (m³)	Kompresor (jumlah unit)
Region I	Aceh dan Sumatera Utara	Tidak ada	0	0,00	0	0
Region II	Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat	Ada	25	59,32	191.568	16
Region III	Jawa Tengah	Ada	1	0,00	0	2
Region IV	Jawa Timur	Ada	9	25,00	819.150	12
Region V	Kalimantan dan Bali	Tidak ada	0	0,00	0	0
Region VI	Sulawesi, Maluku, NTT, NTB, Papua	Tidak ada	0	0,00	0	0
TOTAL NASIONAL			35	84,316	1.010.718,00	30

Kapasitas Infrastruktur CNG masih jauh dari cukup

- Program CNG dirancang untuk memutus ketergantungan itu, tetapi menggantikan seluruh LPG 3 kg bersubsidi menuntut pasokan sekitar 965 juta kaki kubik gas per hari. Sedangkan, apasitas CNG yang benar-benar tercatat dalam rencana induk resmi baru 84 juta kaki kubik per hari.

Tantangan

- Dari enam *region* dalam rencana induk, tiga sama sekali tidak punya fasilitas CNG. Region II menguasai 70 persen kapasitas station nasional, Region IV memegang 81 persen kapasitas penyimpanan.
- Potensi pembengkakan biaya masih ada mengingat terbatasnya infrastruktur seperti *mother station*, *daughter station*, tangki penyimpanan, armada tabung, sampai jaringan pengisian di beberapa wilayah Indonesia.

 **Kebutuhan gas**
965 juta kaki kubik/hari

 **Kapasitas CNG**
84 juta kaki kubik/hari

Kapasitas terdaftar terhadap kebutuhan

8,7%

&

11,4×

untuk memenuhi kebutuhan

Progres Program PLTS 100 GWp (1)

Program PLTS 100 GWp diluncurkan Presiden Prabowo pada 25 Agustus 2026



Berikut status capaian per akhir Agustus 2026:

Rp1.140 T

Estimasi kebutuhan investasi dalam 3 tahun.

1,49 GW

Kapasitas PLTS nasional terpasang per akhir 2025

5,3 GWp

Kapasitas 14 proyek tahap awal di 6 provinsi

Status 14 Proyek Tahap Awal (5.334 MWp) Data per 27 Agustus 2026

Siap Tender: 4.666 MWp

Groundbreaking
396,4 MWp

Beroperasi:
0,998 MWp

Konstruksi: 271 MWp

7 PLTS yang Siap Tender



Sekitar 0,02% dari kapasitas tahap awal telah beroperasi namun sebagian besar masih pada tahap tender hingga konstruksi.

Realisasi penambahan PLTS pada 2025 tercatat 584,7 MW. Untuk mencapai target 100 GWp dalam 3 tahun, sehingga laju pembangunan tahunan perlu naik sekitar 57 kali dari capaian tahun tersebut.

Target tahunan sekitar 33,3 GWp juga lebih besar dibanding total penambahan seluruh jenis pembangkit nasional pada 2025, yang berada di kisaran 7 GW.

Kapasitas PLTS nasional pada akhir 2025 tercatat 1,49 GW, sehingga target 100 GWp setara dengan sekitar 67 kali kapasitas saat ini.

Progres Program PLTS 100 GWp (2)

Kebutuhan Jaringan, Penyimpanan dan Pembiayaan Panel Surya

Jaringan Transmisi

47.758 km

sirkuit transmisi baru yang dibutuhkan

Ditambah kebutuhan kapasitas gardu induk sebesar 107.950 MVA.

Penyimpanan Energi (BESS)

33 GW

kapasitas BESS untuk tahap awal 17 GWp PLTS

Diperlukan untuk menyimpan kelebihan listrik pada siang hari agar dapat digunakan pada malam hari.

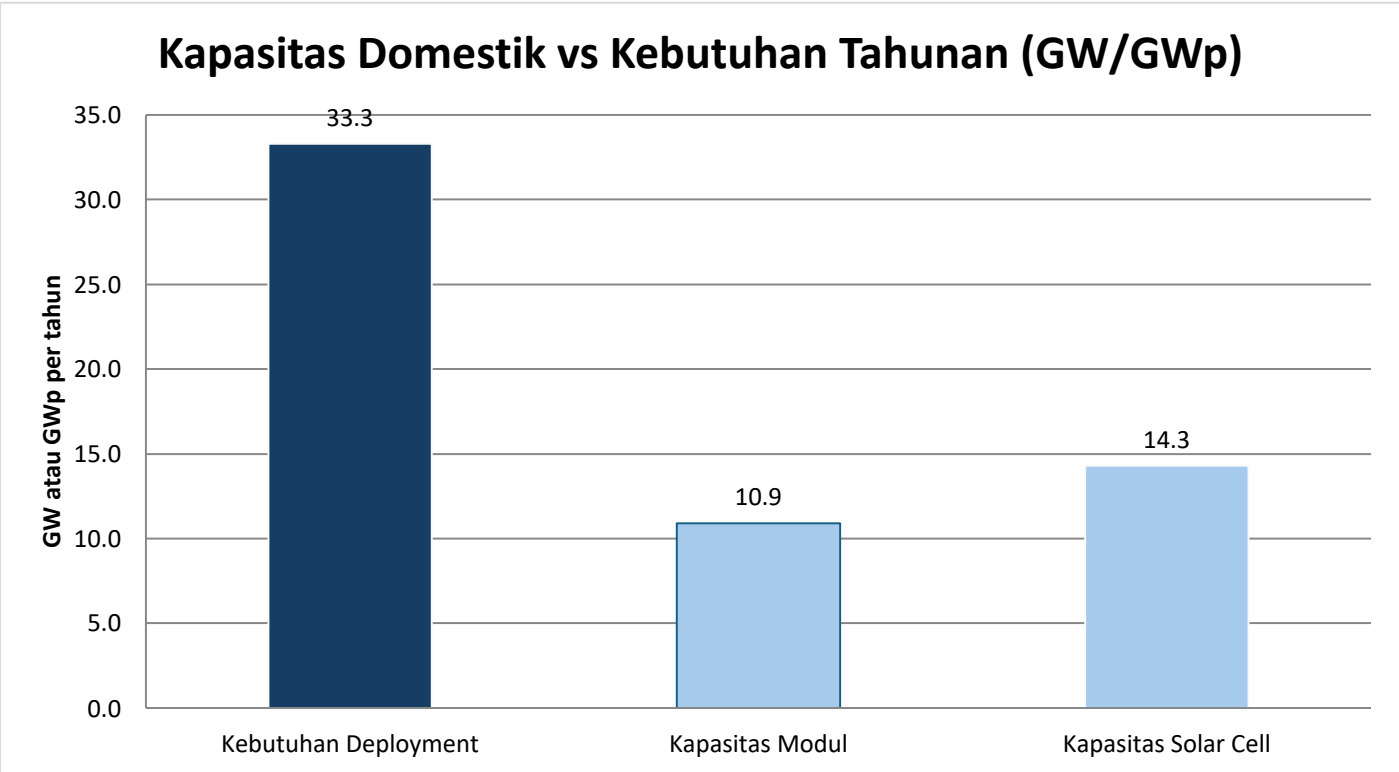
Pembiayaan

±Rp10 T/tahun

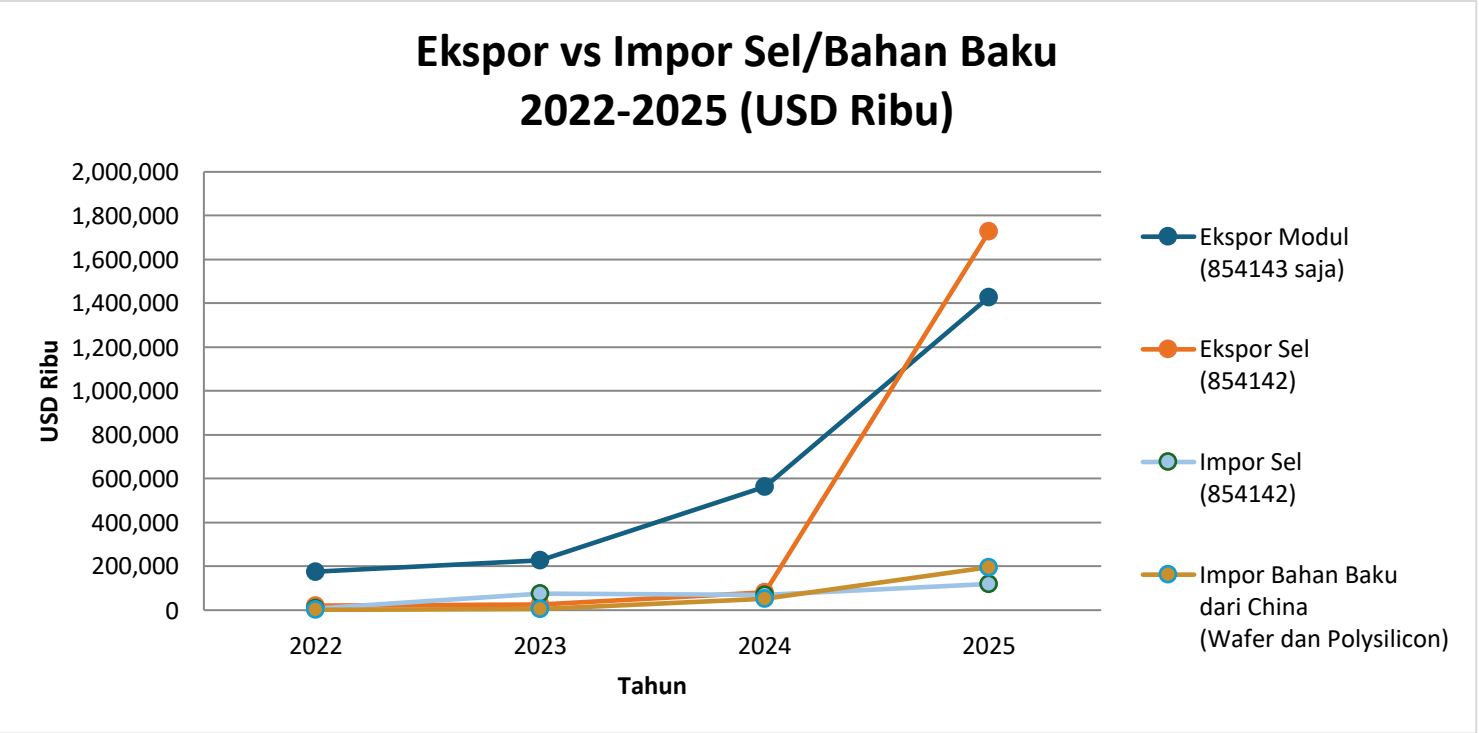
kemampuan APBN Kementerian ESDM per tahun

Total kebutuhan investasi RUPTL 2025-2034 diperkirakan ±Rp3.000 T dengan porsi terbesar diharapkan berasal dari swasta.

Kapasitas Modul Domestik Baru Menutup Sebagian dari Kebutuhan Tahunan



- Kapasitas Sel (14,3 GWp) kini melebihi modul (10,9 GWp) dimana modul jadi titik tersempit, hanya menutup sekitar 33% kebutuhan tahunan (bahkan sebelum hitung utilisasi/downtime).
- Ekspor modul dan sel melonjak tajam tepat saat investigasi AD/CVD "Solar IV" dibuka (2025) *pola rush-to-export* yang berisiko berbalik arah begitu order final berlaku (±Okt 2026). Sementara itu, impor bahan baku dari Tiongkok tetap naik ±140x sejak 2022, menunjukkan ketergantungan hulu belum berkurang meski ekspor hilir melonjak.



Catatan: AD/CVD (Antidumping/Countervailing Duty) adalah bea masuk tambahan yang dikenakan AS atas barang impor yang dijual di bawah harga wajar atau disubsidi pemerintah asal ditetapkan lewat investigasi Departemen Perdagangan AS dan USITC. Kasus "Solar IV" yang menysasar Indonesia dibuka Juli 2025.

Progres Program PLTS 100 GWp (3)

Faktor Pendukung

- Potensi energi surya nasional diperkirakan mencapai 3.294 GWp, jauh di atas target 100 GWp, sehingga dari sisi sumber daya bukan merupakan kendala utama.
- Bila tercapai penuh, program ini diperkirakan menekan emisi sekitar 140,16 juta ton CO₂/tahun, dengan potensi nilai pasar karbon sekitar Rp6,31 T (asumsi USD4/ton CO₂e).
- Sekitar 28.000 ha lahan di Jawa telah diidentifikasi pemerintah untuk mendukung program dengan berbagai model pembangunan dapat dikerjakan paralel di berbagai lokasi.

Tantangan Implementasi

- 01

Perkembangan sekitar 4,55 GWp proyek yang masih berstatus siap tender, apakah bergerak ke tahap groundbreaking.
- 02

Kejelasan skema pembiayaan IPP dibanding Danantara, serta porsi belanja Rp1.140 T
- 03

Skema IPP bersifat *take-or-pay* dimana PLN wajib bayar kapasitas terkontrak meski tak terserap penuh. Beban pembelian listrik dari pihak ketiga sebesar Rp148,75 T (mengalami kenaikan sebelum PLTS 100 GWp beroperasi skala besar) hal ini berisiko membengkak lagi jika *demand* listrik tidak mengejar tambahan *supply*.
- 04

Progres revisi Perpres/RUPTL sebagai dasar koordinasi pelaksanaan lintas kementerian.
- 05

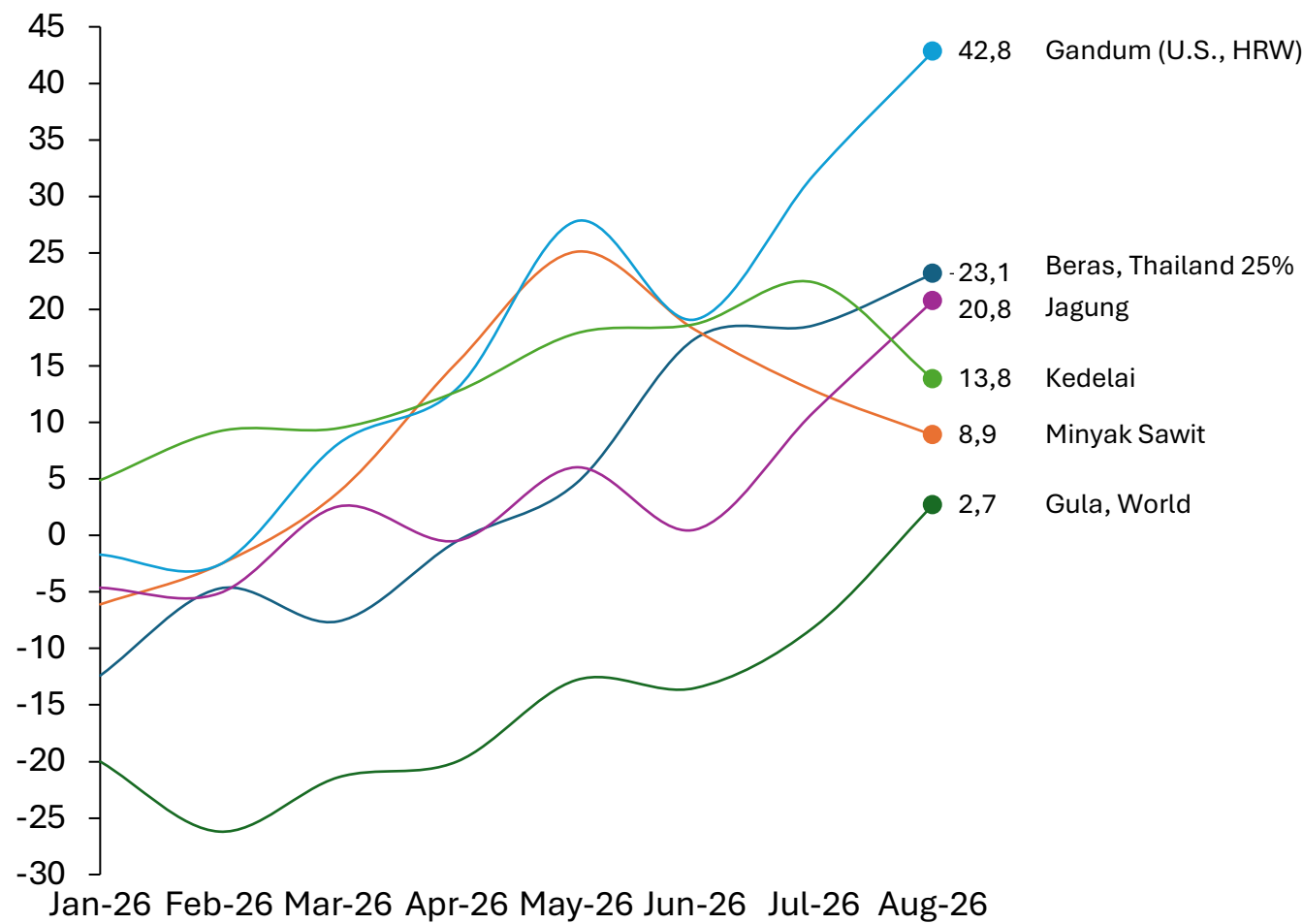
RUPTL 2025-2034 asumsikan pertumbuhan demand ±5,2%/tahun, sementara realisasi 2025 baru 3,75%/tahun. Gap ini memperbesar risiko *oversupply* dan beban kompensasi *take-or-pay* PLN jika berlanjut.

Update Sektor Pangan

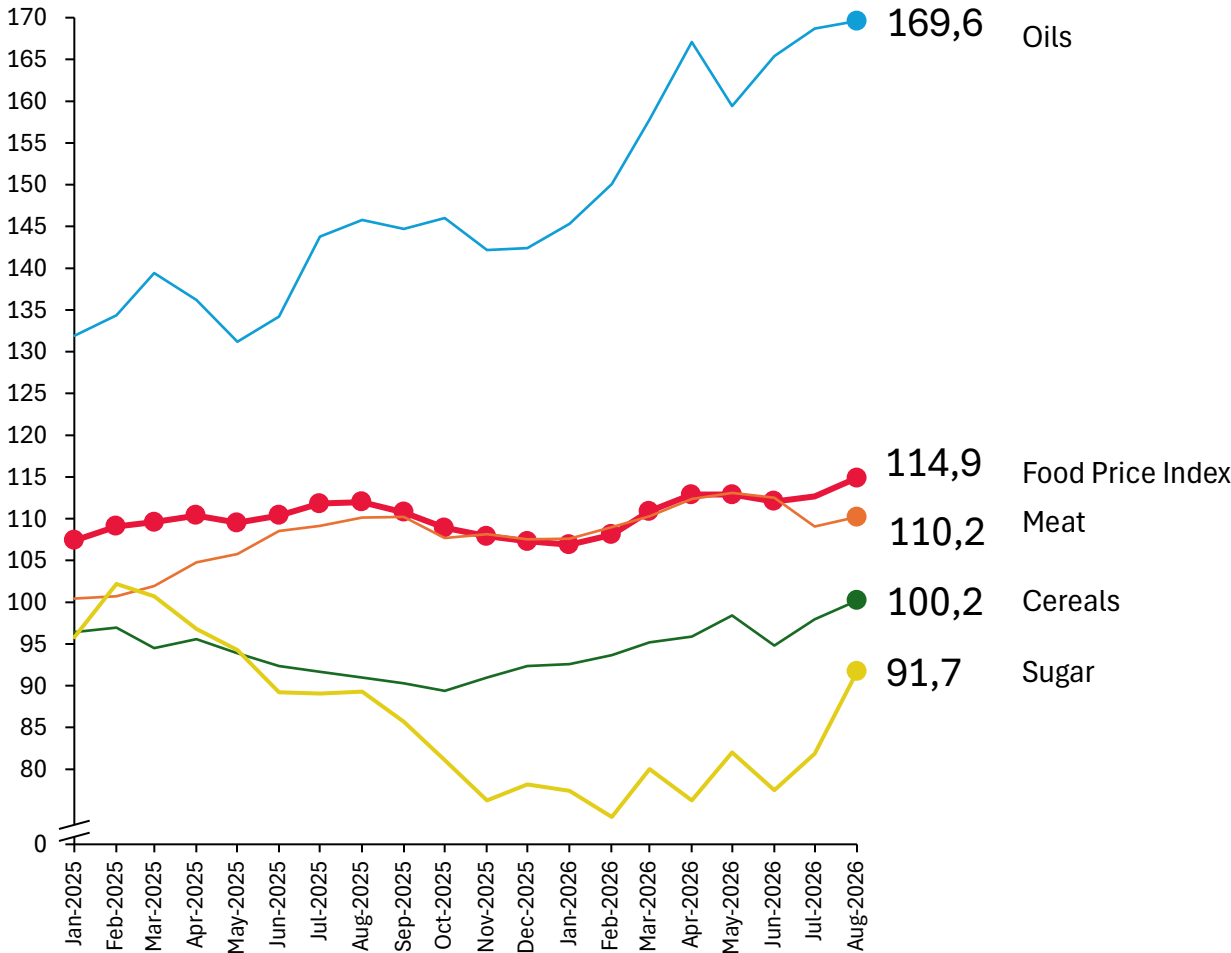


Harga Pangan Global Naik Serentak, Gula Jadi Sorotan Utama

Perkembangan Harga Pangan Global (% Y-to-Y)



Food Prices Index (FAO)

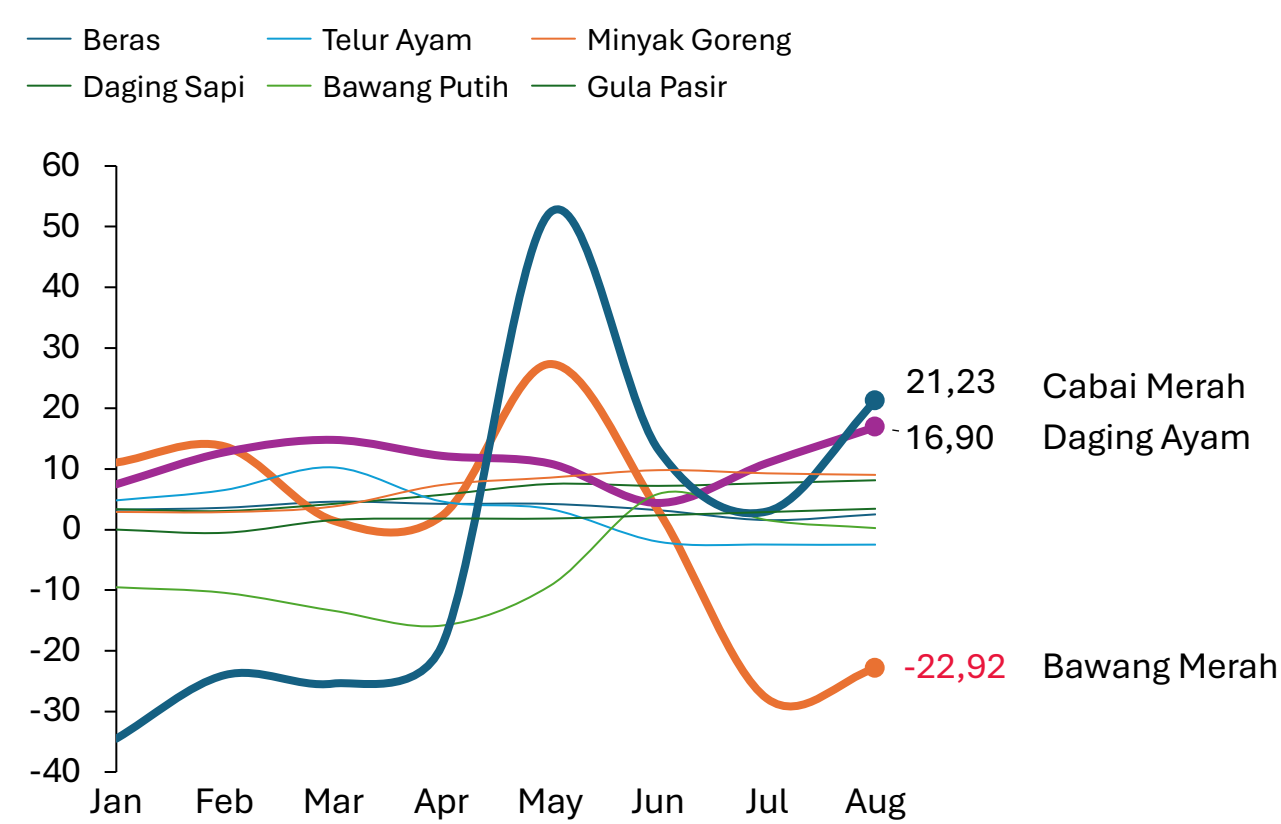


Komoditas	Harga Agustus 2026	%MoM	%YoY	%YtD (Jan-Agt)
Beras, Thailand 25%	\$447/mt	-1,32%	23,14%	11,26%
Minyak Sawit	\$1117/mt	1,45%	8,87%	11,14%
Gula, World	\$0.38/kg	11,76%	2,70%	18,75%
Gandum, U.S., HRW)	\$330/mt	6,45%	42,80%	32,05%
Jagung	\$224/mt	4,97%	20,75%	9,54%
Kedelai	\$403/mt	-1,71%	13,84%	4,40%

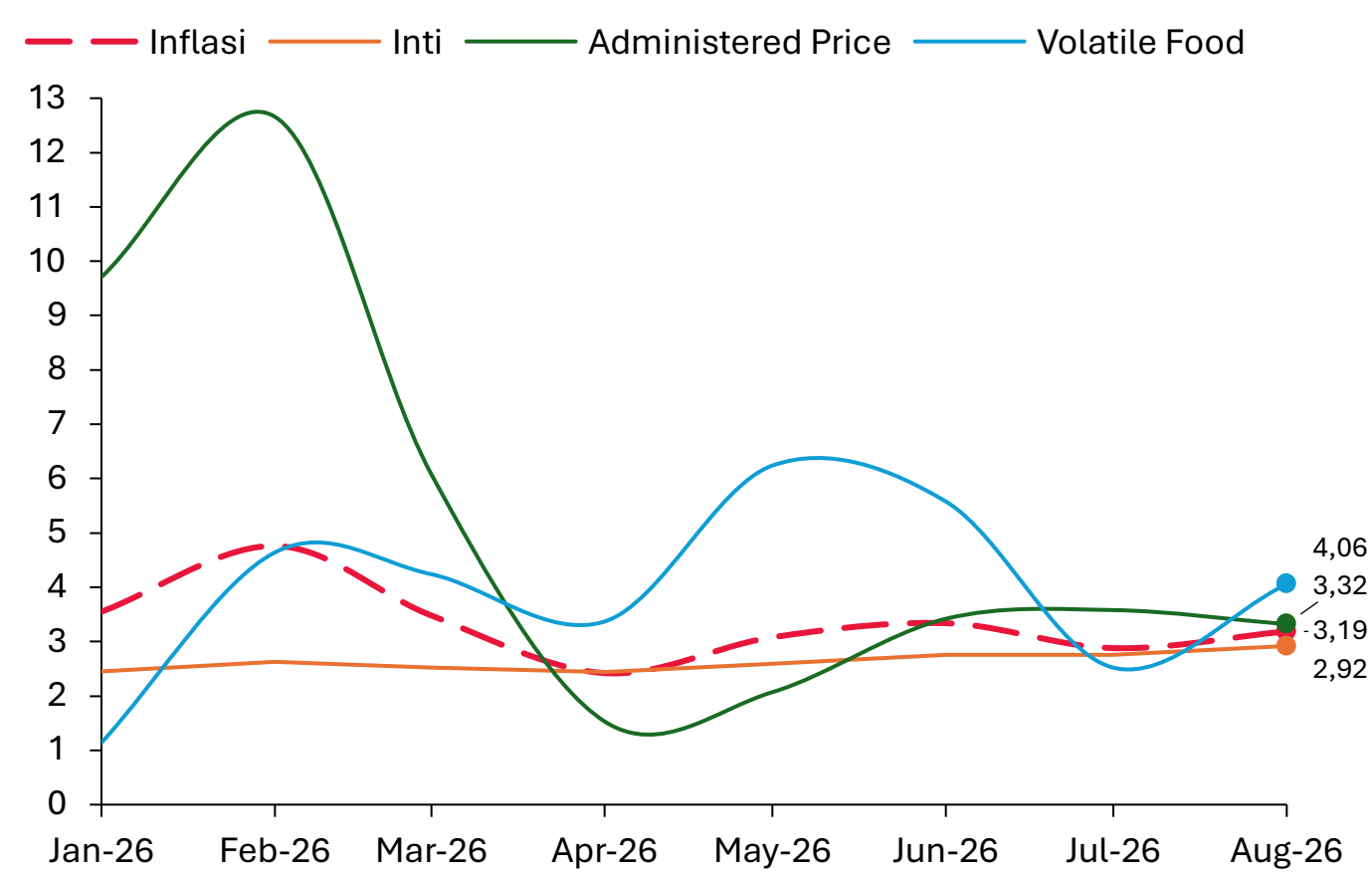
- Harga gula global melonjak hingga 11,76% secara bulanan yang menjadikannya komoditas dengan kenaikan bulanan tertinggi dibandingkan komoditas pangan strategis lainnya. Kenaikan ini turut mengerek naik persentase kenaikan harga secara *year-to-date* sebesar 18,75%.
- Lonjakan harga gula mencerminkan konvergensi risiko energi dan pangan lewat kebijakan larangan ekspor penuh India hingga akhir September yang menghapus 1,59 juta ton ketersediaan pasokan dari pasar global. Di sisi lain, Brazil mengalihkan porsi gilingan tebu nya dari gula ke etanol (turun dari 50% ke 41%) seiring kenaikan harga minyak akibat konflik Timur Tengah. Dua faktor ini menjadi determinan baru dalam perubahan harga gula yang kini banyak ditentukan oleh kalkulasi energi produsen, bukan murni dinamika pangan.
- *Food Price Index* naik ke 114,9, dengan sub-indeks *Meat* dan *Oils* yang secara bersamaan menanjak masing-masing ke level 110,2 dan 169,6. Kenaikan serentak pada beberapa komponen ini menandakan telah terjadinya tekanan harga lintas kategori pada beberapa komoditas pangan, walaupun dengan besaran yang bervariasi.

Volatile Food Kembali Meningkatkan, Dipicu Lonjakan Harga Cabai Rawit dan Permintaan Tinggi dari Program MBG

Perkembangan Harga Pangan Strategis Domestik (% Y-to-Y)



Pergerakan Inflasi Volatile Food (% Y-to-Y)

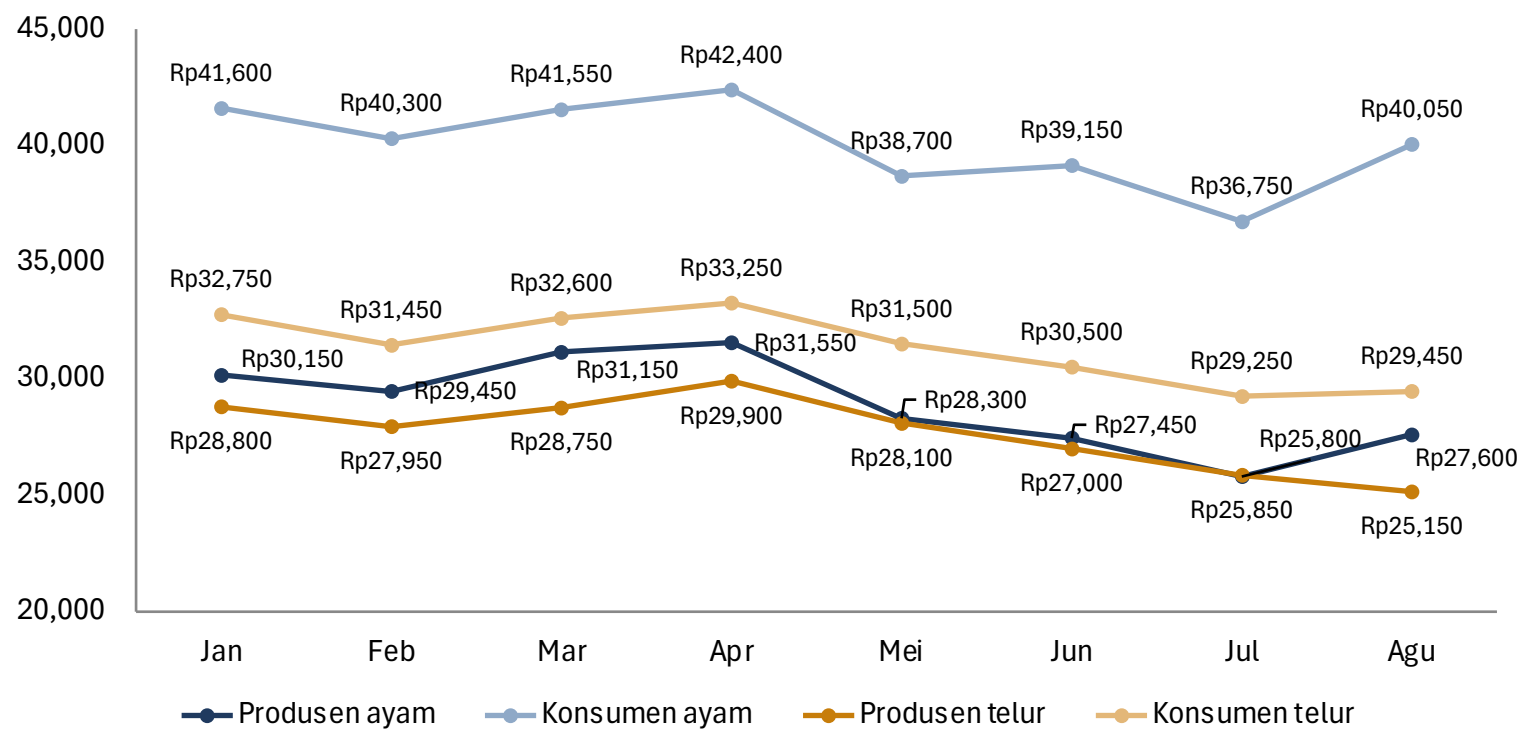


Komoditas	Harga Per 31 Agustus 2026	% MoM	% YtD (Jan-Juli)	% YoY
Beras	Rp16,300	0.62%	3.16%	2,51%
Daging Sapi	Rp148,250	0.54%	6.35%	8.14%
Daging Ayam	Rp42,600	6.63%	2.53%	16.90%
Telur Ayam	Rp29,550	-0.34%	-10.05%	-2.48
Bawang Merah	Rp38,450	-5.06%	-24.68%	-22.92%
Bawang Putih	Rp39,600	-5.38%	-1.49%	0.25%
Cabai Merah	Rp55,450	14.80%	12.25%	21.23%
Gula Pasir	Rp19,600	0.26%	3.70%	3.44%
Minyak Goreng	Rp22,950	0.00%	8.25%	9.03%
Cabai Rawit	Rp73,250	33.67%	10.90%	45.68%

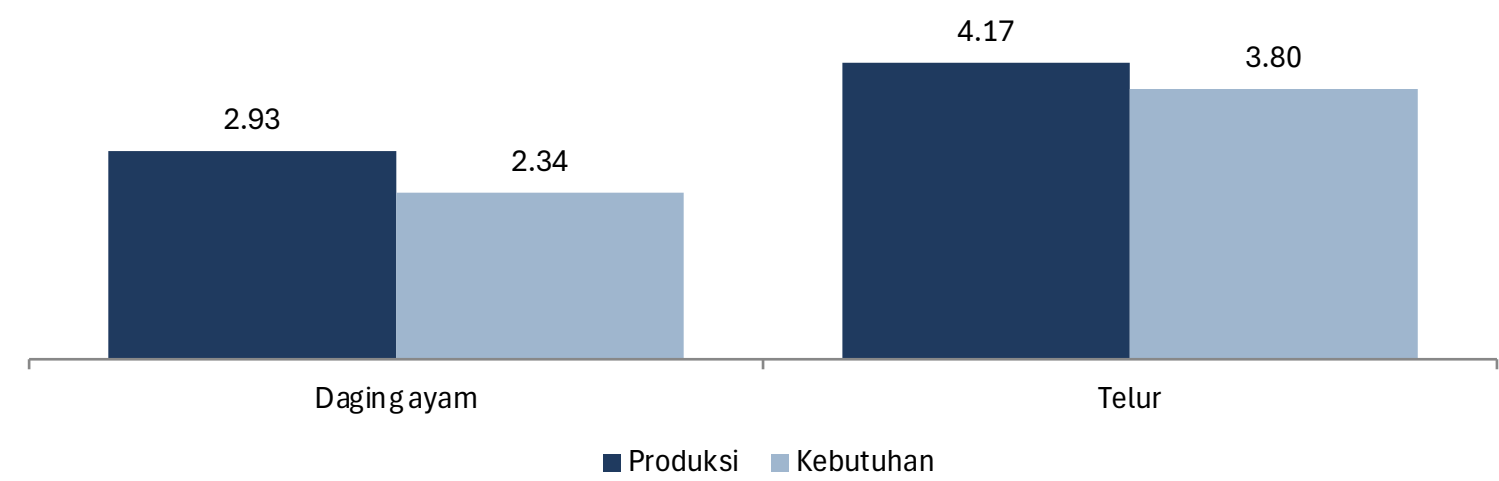
- Setelah sempat anjlok ke 2,52% (YoY) pada Juli 2026, *Volatile Food* melonjak ke 4,06% pada Agustus 2026 melampaui inflasi *headline* (3,32%), *Administered Price* (3,19%), dan Inflasi Inti (2,92%) sehingga menjadikannya komponen dengan tekanan tertinggi untuk pertama kalinya sejak Mei.
- Cabai rawit mencatat kenaikan YoY tertinggi di antara seluruh komoditas (+45,68%). Sempat melonjak lebih dari 100% dalam sehari menjadi Rp120.000/kg pada 11 Agustus 2026, sebelum terkoreksi ke kisaran Rp64.000-74.000/kg di akhir bulan. Terjadi lonjakan tajam sebesar 33,67% (MtoM).
- Bawang merah melanjutkan tren *oversupply* pascapanen raya, kini mencapai -22,92% (YoY) dan -24,68% (YtD). Walaupun demikian, penurunan harga mulai mengalami perlambatan, tercermin pada perubahan sebesar -5,06% yang menggambarkan divergensi tajam dibandingkan dengan komoditas hortikultura lain seperti cabai yang justru melonjak.
- Daging ayam naik 16,90% (YoY) dan 6,63% (MtoM) didorong peningkatan permintaan dari program MBG yang menyerap pasokan ayam dan telur secara masif. Sumber tekanan yang bersifat kebijakan/struktural.

Gejolak Harga Ayam dan Tata Kelola Perunggasan

Harga produsen dan konsumen: ayam dan telur (Rp/kg), 2026



Produksi melebihi kebutuhan: surplus pasokan (juta ton, Jan s.d. Jul 2026)



Sepanjang 2026 harga di tingkat peternak bergerak turun secara tajam. Harga produsen daging ayam ras merosot sekitar 18 persen, dari Rp31.550 per kg pada April menjadi Rp25.800 per kg pada Juli, sebelum sedikit pulih ke Rp27.600 pada Agustus. Di segmen ayam hidup memang terdapat tekanan yang dalam, di mana harga di kandang peternak sempat anjlok ke kisaran Rp14.000 per kg pada awal Juli, jauh di bawah harga pokok produksi Rp21.000 hingga Rp22.000 per kg. Peternak merugi sekitar Rp5.000 hingga Rp7.000 per kg, dan kerugian ini memicu gelombang aksi protes di sejumlah daerah.

Harga di tingkat konsumen memang ikut turun tapi dengan *magnitude* yang jauh lebih kecil, hanya sekitar 13,3 persen, dari Rp42.400 menjadi Rp36.750 per kg pada periode yang sama. Akibatnya, selisih harga produsen dan konsumen bukannya menyempit tapi justru melebar dari sekitar Rp10.850 per kg di awal April menjadi Rp12.450 per kg di awal Agustus ketika harga konsumen kembali naik ke Rp40.050. Hal ini mengindikasikan bahwa penyesuaian harga di sepanjang rantai pasok belum berlangsung secara proporsional meskipun selisih tersebut tidak serta-merta bisa diartikan sebagai margin keuntungan distributor. Tekanan serupa juga terjadi pada telur ayam ras dengan harga produsen turun ke Rp25.150 per kg di awal Agustus, masih di bawah harga acuan pemerintah sebesar Rp26.500 per kg.

Pada akhir Juni 2026, pemerintah bersama pelaku usaha menyepakati kenaikan bertahap harga ayam hidup hingga minimal Rp19.500 per kg pada pertengahan Juli, dengan target akhir menuju Harga Acuan Pemerintah sebesar Rp25.000 per kg. Kesepakatan ini dibarengi dengan percepatan penyerapan *live bird*, peningkatan kapasitas pemotongan di Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), serta pengawasan bersama oleh pemerintah, Satgas Pangan, dan KPPU. Penyerapan ayam dan telur lewat Program Makan Bergizi Gratis juga didorong sebagai sumber *demand* tambahan. Hasilnya cukup terlihat, di mana harga ayam hidup di tingkat peternak pulih ke Rp22.477 per kg pada akhir Juli. Namun, keberlanjutannya tetap bergantung pada kepatuhan pelaku usaha, konsistensi pengawasan, dan kemampuan program penyerapan untuk menciptakan permintaan yang stabil serta terhubung langsung dengan peternak.

Gejolak harga ini juga mencerminkan persoalan struktur dan tata kelola industri perunggasan itu sendiri yang terintegrasi secara vertikal dari penyediaan bibit dan pakan hingga budidaya, pemotongan, *cold storage*, distribusi, dan pengolahan. Integrasi ini memang bisa menghasilkan efisiensi tapi KPPU juga menyoroti risiko ketimpangan posisi tawar bagi peternak mandiri, mengingat sekitar 80 persen pasar dikuasai perusahaan terintegrasi. Tekanan terhadap peternak unggas juga terlihat dari indeks harga yang diterima kelompok unggas yang turun dari 138,2 di Maret menjadi 127,2 di Juni 2026. Di saat yang sama, disparitas harga antar wilayah masih sangat lebar. Pada awal Agustus, harga berkisar dari Rp19.600 per kg di Nusa Tenggara Barat hingga Rp45.850 per kg di Papua Barat, atau sekitar 2,34 kali lipat, bahkan sempat mencapai 2,77 kali di awal Juli 2026. Artinya, persoalan perunggasan bukan hanya soal *oversupply* nasional tetapi juga soal posisi tawar peternak, fragmentasi pasar, kapasitas penyimpanan dan pemotongan, serta keterhubungan antara wilayah surplus dan defisit.

Krisis Pangan Global Bergerak Melalui Lima Kanal yang Saling Memperkuat

Kerangka 5 Kanal Utama Terjadinya Krisis Pangan Global

Pecahnya krisis pangan yang diproyeksikan terjadi pada 2027 dengan inflasi pangan global melonjak dari 2,8% menjadi 5%, berangkat dari lima kondisi utama yang secara bersama-sama menekan rantai pasok pangan dari hulu ke hilir: War, Weather, Warehousing, Water, dan Waste.

Konflik (War)

Konflik Iran yang meningkat sejak akhir Februari 2026 mengganggu Selat Hormuz secara serius dan menyebabkan signifikansi yang besar akibat terganggunya distribusi 1/3 pupuk nitrogen dunia yang sangat esensial bagi separuh tanaman pangan di dunia.

Cuaca (Weather)

Probabilitas 81% terbentuknya Super El Nino pada akhir 2026 yang jika benar-benar terjadi, 97% akan bertahan hingga 2027. Diperkirakan menjadi tambahan sebesar 0.7% bagi inflasi pangan dunia hanya dari fenomena cuaca ini saja.



Inefisiensi (Waste)

kehilangan pascapanen dan inefisiensi rantai pasok memperbesar kesenjangan antara produksi dan ketersediaan riil, terutama di negara berkembang dengan infrastruktur pendingin & penyimpanan terbatas.

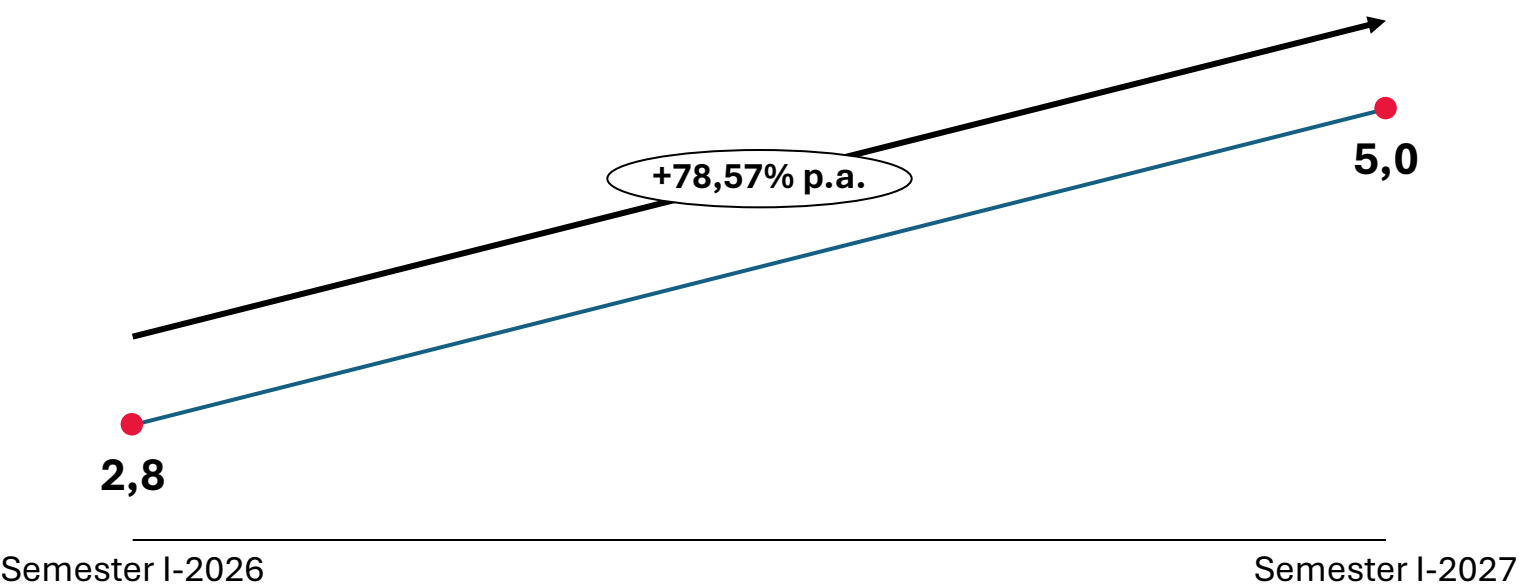
Logistik (Warehousing)

Terkait erat dengan gangguan rantai pasok akibat perang dan pembatasan pelayaran, memperlambat distribusi input pertanian dan hasil panen antarnegara

Krisis Air Bersih (Water)

Berkorelasi langsung dengan risiko El Niño: kekeringan berkepanjangan mengurangi ketersediaan air irigasi, yang menjadi prasyarat produksi sebelum faktor lain (benih, pupuk) relevan.

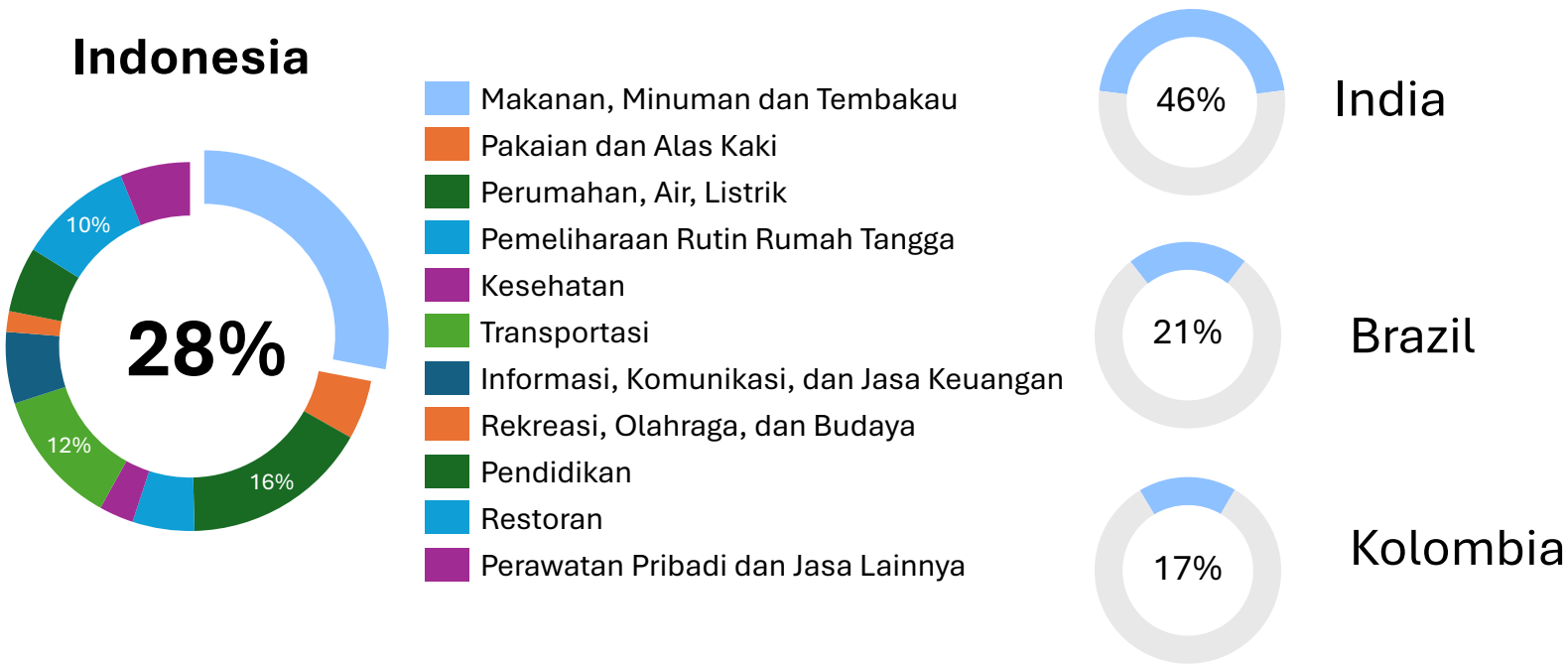
Proyeksi Inflasi Pangan Dunia Tembus 5% Pada 2027



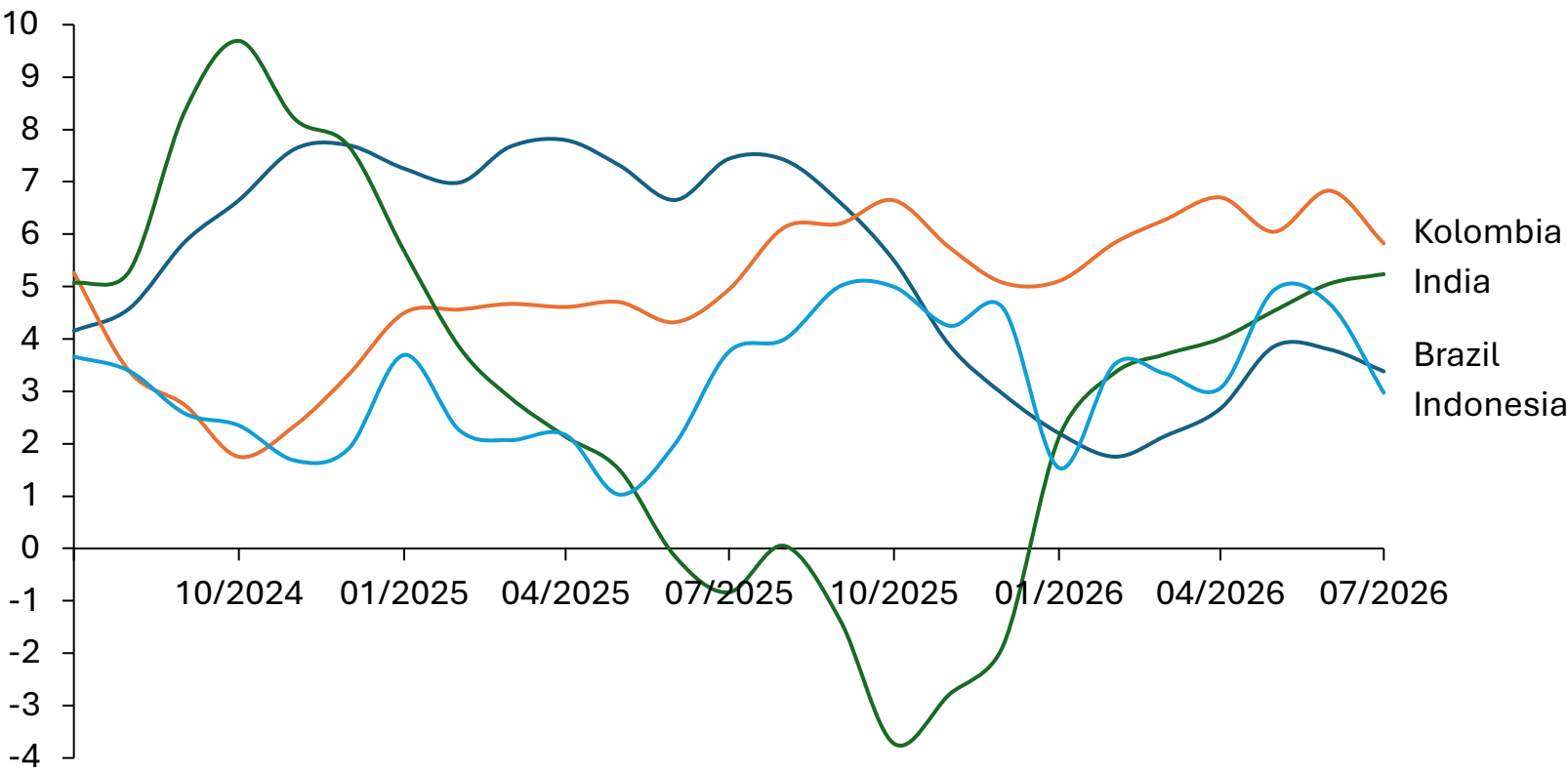
- Proyeksi lonjakan inflasi pangan global menembus 5% pada semester I 2027 ini didorong oleh lima kanal risiko yang saling terhubung dan memperkuat satu sama lain dan disebut "Five Ws": War, Weather, Warehousing, Water, dan Waste. Kelima kanal ini bekerja di sepanjang mata rantai pangan secara menyeluruh: dari sisi produksi (gangguan pasokan pupuk akibat konflik geopolitik dan ancaman kekeringan akibat El Niño), sisi distribusi (hambatan logistik dan pergudangan), hingga sisi ketersediaan akhir bagi rumah tangga (inefisiensi dan pemborosan pangan yang memperlebar kesenjangan antara produksi dan konsumsi riil).
- Krisis ini bertransmisi ke perekonomian secara luas. Sebagai kebutuhan pokok berbobot besar dalam keranjang konsumsi, kenaikan harga pangan langsung menggerus daya beli riil masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Tekanan ini berpotensi merembet lewat pelemahan konsumsi domestik, tekanan nilai tukar akibat naiknya biaya impor pangan-pupuk, hingga risiko efek putaran kedua ke inflasi non-pangan
- Indonesia menjadi salah satu negara paling rentan terhadap krisis ini, bersama India, Brazil, dan Kolombia yang memenuhi seluruh kriteria kerentanan sekaligus: bobot pangan tinggi dalam keranjang CPI (30-50% dari struktur inflasi), ketergantungan berat pada impor pupuk, dan sektor pertanian yang sangat bergantung pada pola cuaca musiman.

Rantai Transmisi Kerentanan Pangan Mengguncang Perekonomian Global

Dominasi Makanan dan Minuman Pada Struktur Indeks Harga Konsumen

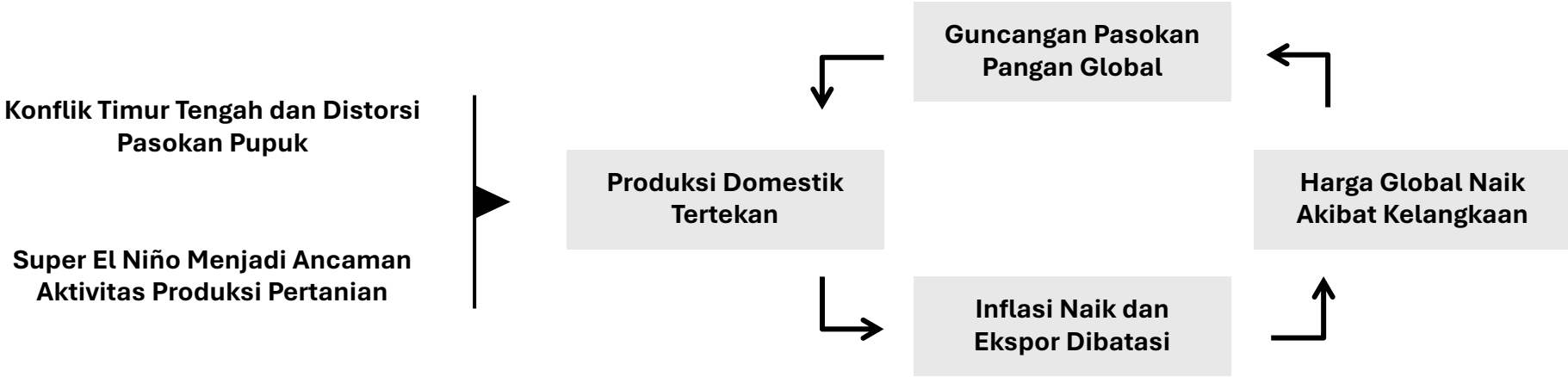


Inflasi Makanan dan Minuman (% Y-o-Y)



Dominasi Pangan dalam Komposisi Inflasi sebagai Cerminan Rendahnya Pendapatan Per Kapita

Dominasi pangan dalam struktur inflasi Indonesia, India, Brazil, dan Kolombia pada dasarnya adalah manifestasi dari Hukum Engel. Pada level pendapatan per kapita yang lebih rendah, pangan berfungsi sebagai kebutuhan inelastis yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum rumah tangga mengalokasikan sisa pendapatannya ke barang dan jasa yang lebih diskresioner seperti perumahan premium, hiburan, atau produk keuangan. India mencatatkan bobot pangan tertinggi di 46%, diikuti Indonesia di 28%, Brazil di 21%, dan Kolombia di 17%. Dominasi pangan dalam komposisi inflasi pada keempat negara ini sejalan dengan tingkat pendapatan per kapita dan struktur ekonomi masing-masing negara, di mana keempatnya memiliki populasi agraris yang masih signifikan; pola konsumsi yang berpusat pada *staple food* seperti beras, jagung, dan gandum; serta sektor jasa modern yang belum cukup matang untuk "mengencerkan" porsi relatif pangan dalam daftar kebutuhan konsumsi rumah tangga.

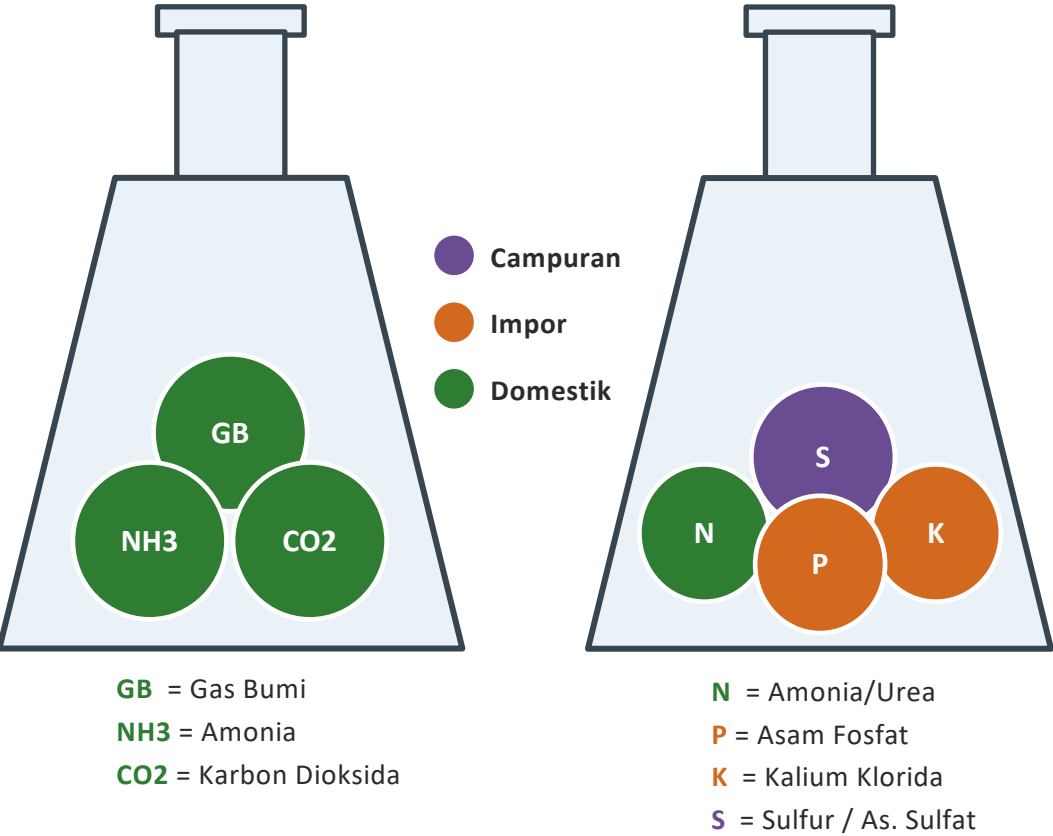


Kerentanan Pangan dan Guncangan Berantai bagi Perekonomian

Tingginya bobot pangan dalam struktur inflasi domestik membuat guncangan harga global menjalar lebih cepat ke dalam negeri. Di sisi lain, ketergantungan pada impor pupuk nitrogen dari kawasan Teluk Persia yang kini dibayangi eskalasi konflik Iran dan ancaman penutupan Selat Hormuz memperparah kerentanan, ditambah lagi dengan karakter agraris tropis yang mudah terguncang oleh El Niño. Ketiganya saling mengunci dalam satu lingkaran yang sulit diputus, yaitu guncangan pasokan pupuk berpadu dengan tekanan iklim yang menahan produksi pertanian domestik. Produksi yang tertahan itu kemudian mendorong inflasi pangan melonjak. Mengingat bobotnya yang besar dalam *Consumer Price Index* (CPI), lonjakan inflasi memaksa pemerintah menahan laju ekspor demi mengamankan pasokan domestik yang pada gilirannya justru mengerek harga di pasar internasional yang kembali menjalar sebagai tekanan tambahan bagi pasokan pupuk dan komoditas itu sendiri. Yang patut dicermati, bahkan sebelum Super El Niño benar-benar datang, tekanan inflasi pangan di keempat negara tersebut sudah memanas dan terus meningkat menjelang pertengahan 2026, sebuah sinyal bahwa ruang gerak bank sentral untuk menyerap guncangan tanpa harus mengorbankan momentum pertumbuhan ekonomi kini menjadi jauh lebih sempit.

Ketergantungan Impor Pupuk NPK Menjadi Titik Rawan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Indonesia

Komposisi Bahan Baku Pupuk Urea dan NPK



Swasembada di Urea, Ketergantungan Impor di NPK

Urea dan NPK memiliki tingkat kemandirian produksi yang sangat berbeda. Urea dapat diproduksi sepenuhnya di dalam negeri berkat ketersediaan gas alam sebagai bahan baku, sementara NPK sebagai pupuk majemuk membutuhkan fosfor dan kalium yang sama sekali tidak tersedia dari alam Indonesia sehingga hampir seluruh bahan bakunya harus diimpor dari negara pemasok global.

Ketergantungan ini bukan sekadar persoalan teknis, karena NPK memiliki peran yang setara pentingnya dengan urea dalam mendukung produktivitas pertanian. Tanpa pasokan yang memadai, target-target produksi pangan nasional, termasuk swasembada, akan sulit tercapai. Karenanya, aktivitas impor bahan baku tersebut menjadi kebutuhan struktural yang tidak terelakkan dan bukan sekadar pilihan kebijakan.

Blokade Hormuz Mendistorsi Harga Pupuk

Eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengganggu Selat Hormuz sejak akhir Februari 2026 mengancam rantai pasok pupuk Indonesia, mengingat selat ini menjadi jalur sepertiga perdagangan pupuk nitrogen dunia sekaligus jalur ekspor sulfur dari kawasan Teluk yang menjadi bahan baku penting pemrosesan fosfat menjadi DAP, MAP, dan TSP yang dibutuhkan oleh Indonesia dalam penyediaan pupuk NPK.

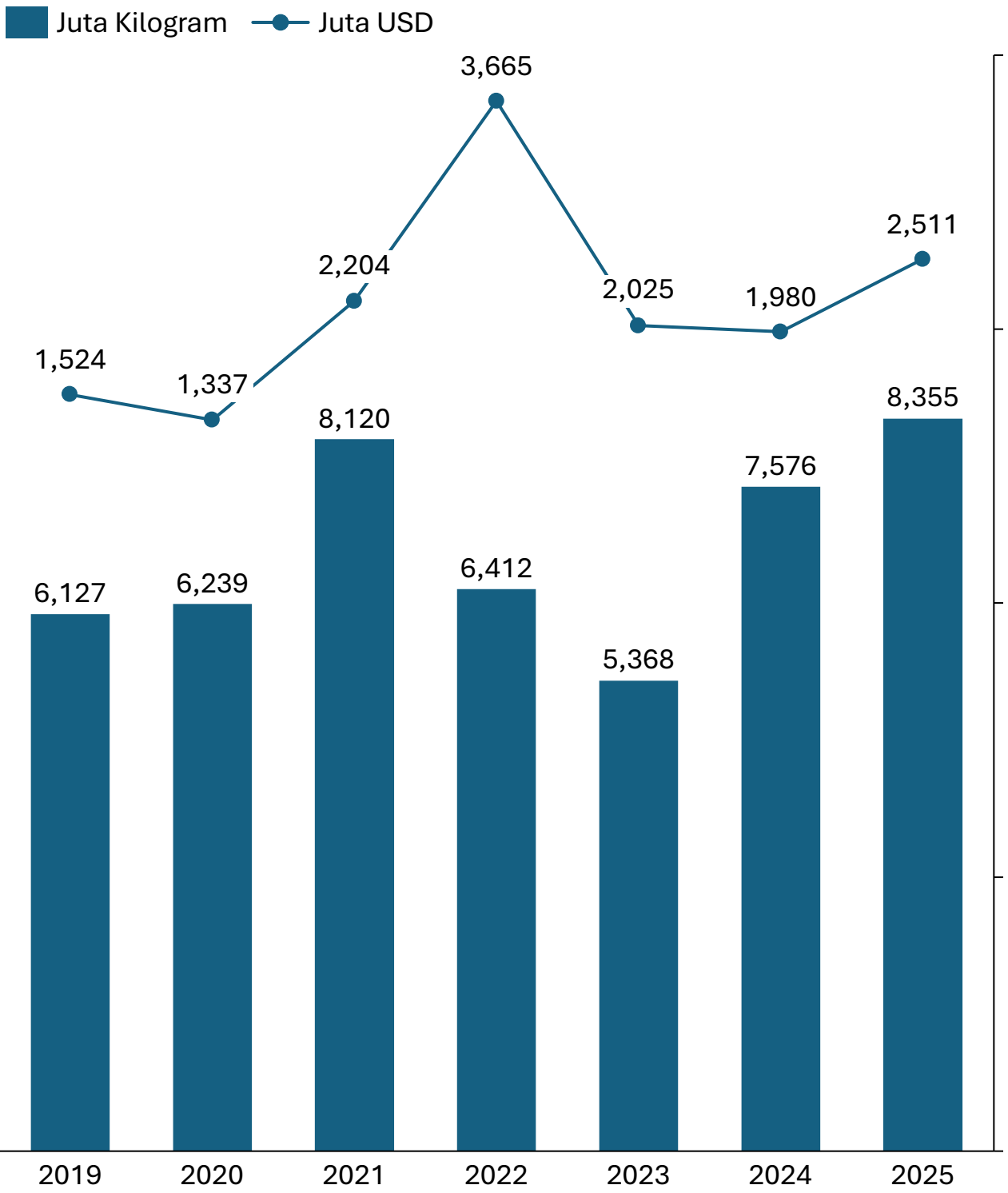
Preseden Historis Lonjakan Harga Pupuk Indonesia

Preseden serupa sudah pernah terjadi. Data aktivitas impor pupuk nasional mencatat lonjakan tajam nilai impor pada 2022 menjadi 3.665 juta USD dari 2.204 juta USD setahun sebelumnya, meski volumenya justru turun. Hal tersebut berangkat dari kenaikan harga satuan yang tajam akibat guncangan pasar kalium dan gas alam global kala itu. Tekanan harga tinggi tersebut kemudian menyeret volume impor anjlok ke titik terendah pada 2023, sebelum kembali pulih pada 2024-2025 seiring harga yang mereda.

Ketergantungan yang Memaksa dan Tekanan pada Rupiah

Dengan permintaan pupuk yang bersifat inelastis karena aktivitas pertanian yang tak dapat ditunda meskipun di tengah terjadinya konflik geopolitik, nilai impor dalam dolar pun membengkak dan menambah tekanan permintaan valuta asing yang turut menggerus Rupiah dan pada gilirannya berimplikasi memperberat biaya impor pupuk akibat pelemahan Rupiah itu sendiri.

Perkembangan Impor Pupuk Indonesia (Volume dan Nilai)



Ekspor Beras Turun 97-99%: Surplus Produksi Tidak Otomatis Menjadi *Exportable Surplus*



- Ekspor beras mengalami kontraksi drastis sejak 2021 dengan volume HS 1006 turun sekitar 97% hingga 2025 dan HS 100630 bahkan turun sekitar 99%. Kondisi ini sejalan dengan orientasi kebijakan pemerintah yang menempatkan swasembada dan ketahanan pangan sebagai prioritas utama sehingga produksi beras lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan domestik.
- Kontraksi ekspor tidak serta-merta menunjukkan pelemahan daya saing beras Indonesia tetapi juga mencerminkan kebijakan pengendalian perdagangan beras sebagai komoditas strategis. Dalam konteks pencapaian swasembada, pembatasan ekspor berfungsi untuk memastikan ketersediaan beras domestik sebelum membuka ruang bagi pasar eksternal.
- Swasembada tidak hanya ditentukan oleh kemampuan meningkatkan produksi tetapi juga oleh kemampuan membangun cadangan beras yang memadai. Oleh karena itu, surplus produksi belum otomatis menjadi *exportable surplus*. Sebagian perlu dialokasikan untuk memenuhi konsumsi nasional, stabilisasi harga, dan penguatan cadangan pangan pemerintah.
- Keberhasilan dalam meningkatkan produksi dan cadangan beras akan menciptakan ruang ekspor yang lebih besar secara bertahap. Namun, ekspor idealnya tetap dilakukan secara terukur, selektif, dan berbasis surplus, sehingga tidak mengurangi kapasitas pemerintah dalam menjamin kecukupan dan stabilitas pasokan domestik.

Ekspor Beras Tidak Memiliki Basis Pasar yang Stabil: Tujuan Ekspor Bergeser Tajam Setelah 2023

Negara Tujuan Ekspor HS Code 1006 Berdasarkan Volume, 2020–2025

2020	2021	2022	2023	2024	2025
USA 100.000 kg	Philipina 3.019.000 kg	Philipina 2.681.014 kg	Philipina 1.438.300 kg	Kamboja 425.000 kg	Brunei Darussalam 31.650 kg
Singapura 84.146 kg	Arab Saudi 66.253 kg	Jepang 99.052 kg	Arab Saudi 70.270 kg	Brunei Darussalam 42.500 kg	Malaysia 17.325 kg
Belgia 65.067 kg	Brunei Darussalam 41.500 kg	Brunei Darussalam 44.000 kg	USA 41.607 kg	Malaysia 32.068 kg	Arab Saudi 15.714 kg
Malaysia 32.620 kg	Singapura 39.160 kg	Malaysia 42.103 kg	Brunei Darussalam 38.000 kg	Arab Saudi 8.246 kg	Belanda 10.497 kg
Brunei Darussalam 32.600 kg	Belgia 29.946 kg	Arab Saudi 41.900 kg	Malaysia 34.571 kg	Papua Nugini 5.000 kg	Timor-Leste 6.150 kg

- Ekspor HS 1006 menunjukkan konsentrasi pasar yang sangat kuat pada periode 2021–2023, ketika Filipina menjadi tujuan utama dengan volume mencapai 3,02 juta kg pada 2021 dan 2,68 juta kg pada 2022.
- Namun, ketergantungan tersebut tidak berlanjut. Volume ke Filipina turun menjadi sekitar 1,44 juta kg pada 2023 dan kemudian posisi tujuan terbesar berpindah ke Kamboja pada 2024.
- Pada 2025, bahkan pasar terbesar hanya Brunei Darussalam dengan 31.650 kg, menunjukkan bahwa skala ekspor telah menyusut jauh dibandingkan dengan periode sebelumnya.
- Indonesia sebenarnya telah menjangkau sejumlah pasar regional dan non-regional, tetapi volumenya relatif kecil dan belum menunjukkan kesinambungan sebagai basis ekspor struktural.
- Karena itu, agenda ekspor ke depan bukan sekadar mencari negara pembeli baru, tetapi membangun portofolio pasar yang lebih terdiversifikasi dan mampu menyerap ekspor secara berulang ketika *exportable surplus* tersedia.
- Indonesia memiliki akses ke banyak pasar, tetapi belum memiliki pasar ekspor beras yang cukup dalam, stabil, dan terdiversifikasi.

Ekspor Beras HS 100630 Menyusut: Basis Pasar Global Indonesia Makin Tipis

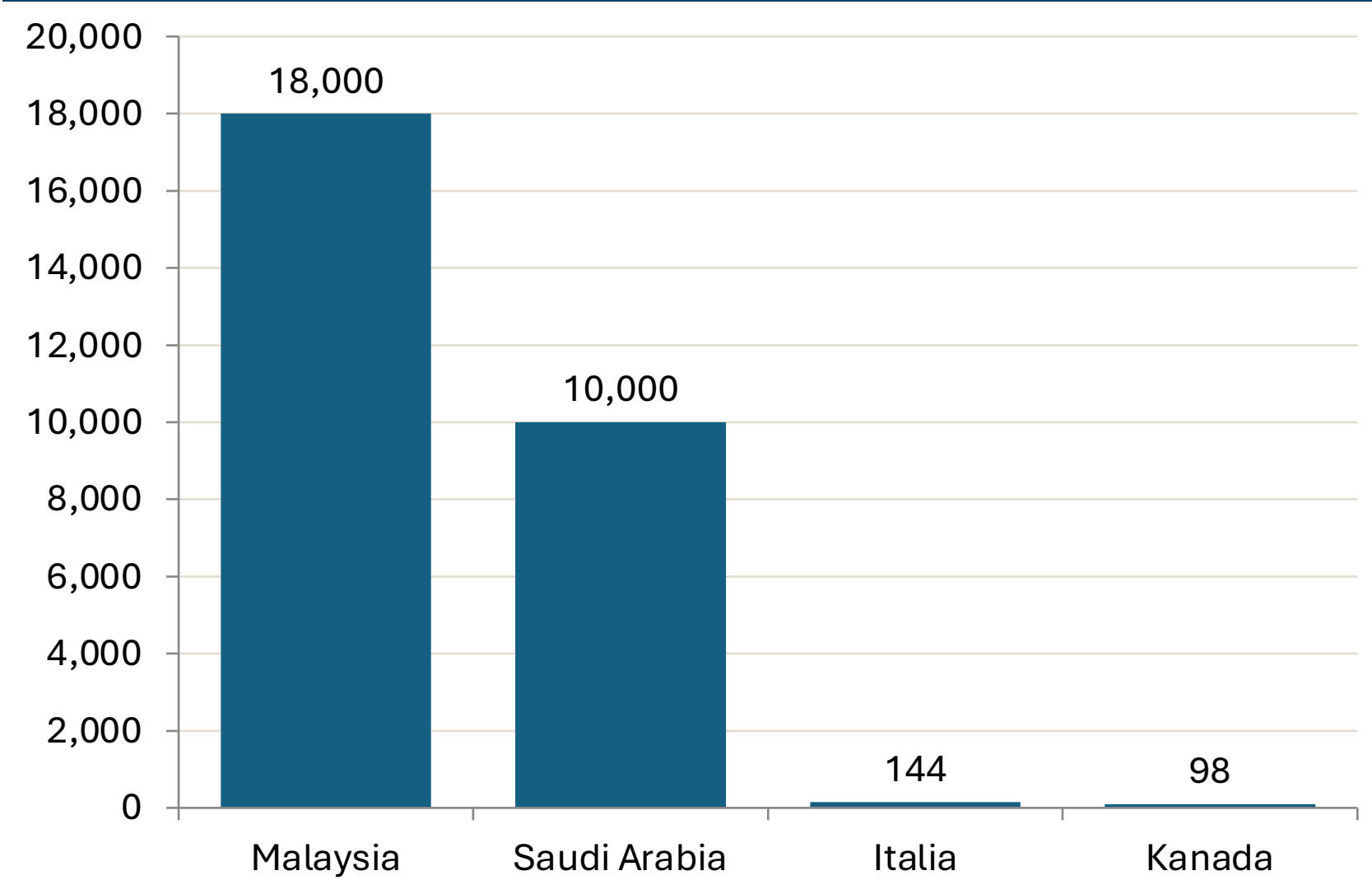
Negara Tujuan Ekspor HS Code 100630 Berdasarkan Volume, 2020–2025

2020	2021	2022	2023	2024	2025
USA 100.000 kg	Philipina 3.019.000 kg	Philipina 2.681.000 kg	Philipina 1.438.300 kg	Kamboja 425.000 kg	Malaysia 16.175 kg
Singapura 83.510 kg	Arab Saudi 63.002 kg	Arab Saudi 41.900 kg	Arab Saudi 70.270 kg	Malaysia 32.068 kg	Arab Saudi 15.714 kg
Belgia 65.067 kg	Singapura 38.620 kg	Malaysia 41.523 kg	USA 41.607 kg	Arab Saudi 8.246 kg	Uni Emirat Arab 1.161 kg
Malaysia 32.620 kg	Malaysia 28.110 kg	Afghanistan 30.000 kg	Malaysia 34.470 kg	Papua Nugini 5.000 kg	Singapura 620 kg
Timor-Leste 25.000 kg	USA 21.400 kg	USA 20.000 kg	Uni Emirat Arab 2.214 kg	Kanada 3.124 kg	Qatar 216 kg

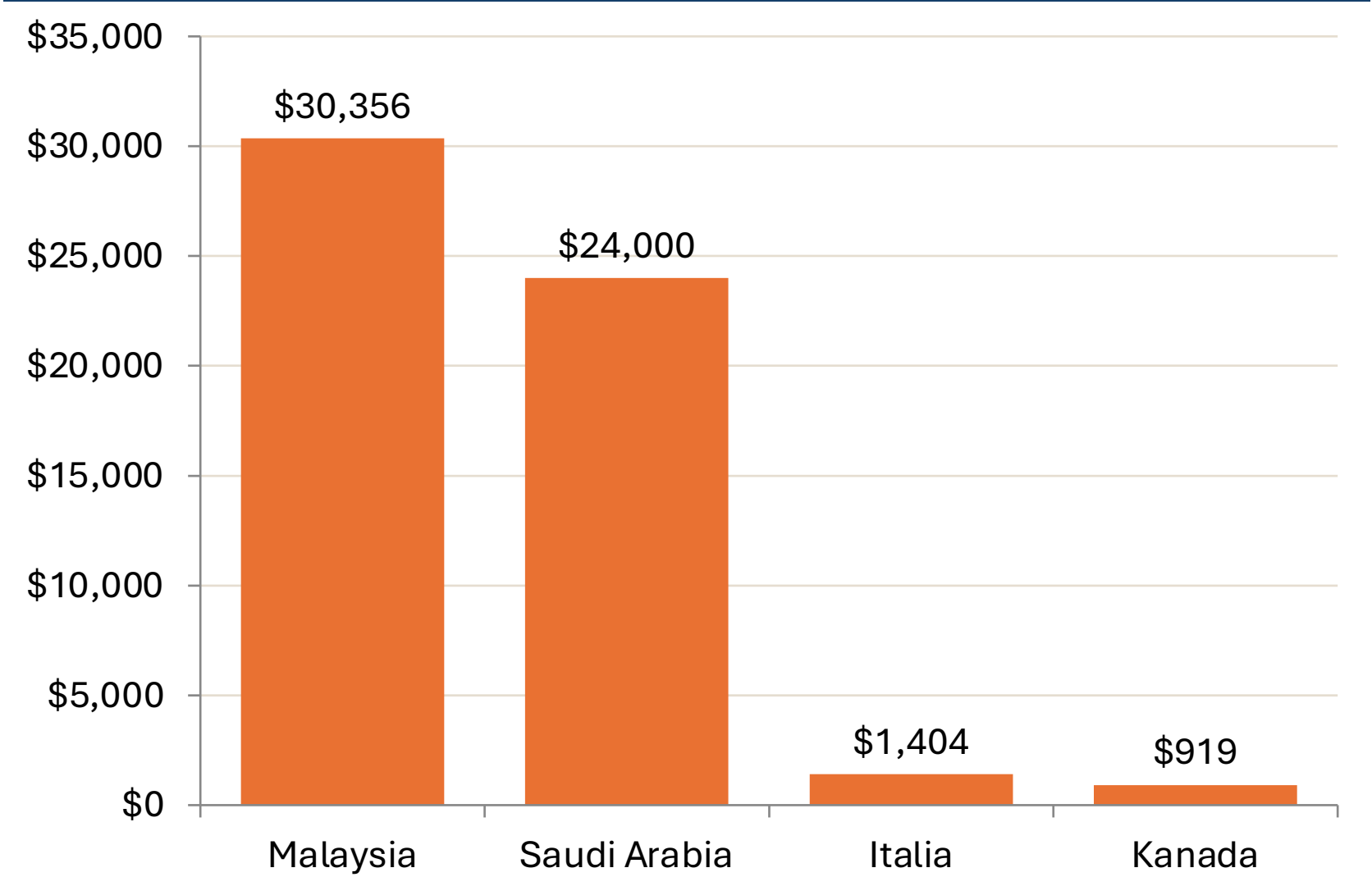
- Pola HS 100630 mempertegas temuan pada HS 1006. Ekspor sangat besar ke Filipina pada 2021–2023 tetapi kemudian mengalami penurunan tajam. Setelah 2023, pusat ekspor bergeser ke pasar dengan volume jauh lebih kecil, dari Kamboja pada 2024 menjadi Malaysia pada 2025. Pada 2025, volume ekspor HS 100630 semakin terfragmentasi dan sangat kecil, dengan Arab Saudi 15.714 kg, UEA 1.161 kg, Singapura 620 kg, dan Qatar hanya 216 kg.
- Artinya, persoalan ekspor Indonesia bukan lagi sekadar kehilangan satu pasar utama, tetapi mengecilnya keseluruhan *export base*.
- Dalam kondisi seperti ini, mengejar volume semata bukan strategi yang paling rasional. Peningkatan *unit value*, diversifikasi produk, dan pengembangan pasar *niche* lebih relevan untuk mengubah ekspor yang kecil menjadi ekspor yang bernilai.
- Ketika *exportable surplus* tersedia, Indonesia perlu memastikan surplus tersebut masuk ke pasar yang memberikan *return* lebih tinggi dan tidak menciptakan tekanan baru terhadap pasar domestik. Ketika volume ekspor semakin tipis, strategi yang rasional bergeser dari *volume-seeking* menuju *value-seeking*.

Diversifikasi Pasar Ekspor Beras 2026 Masih Lemah di Tengah Potensi Pasar Bernilai Tinggi

Ekspor Beras berdasarkan Negara Tujuan Januari - Juli 2026 (kg)



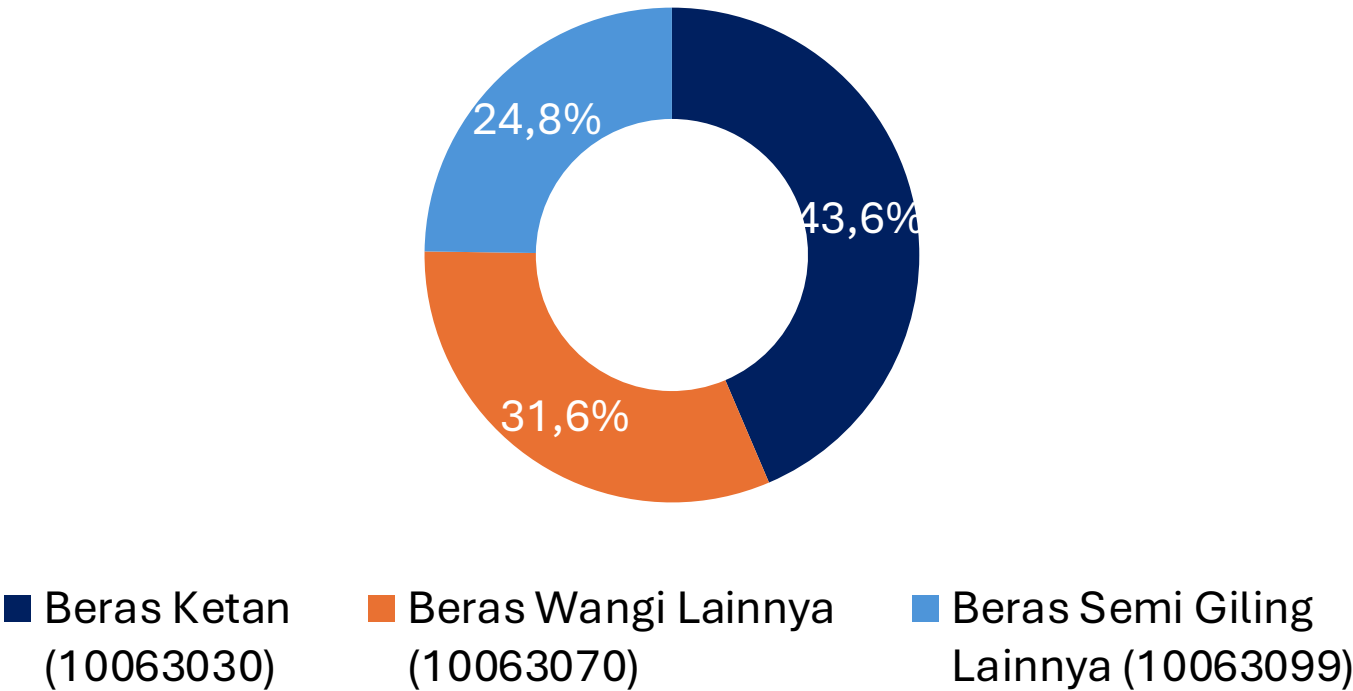
Ekspor Beras berdasarkan Negara Tujuan Januari – Juli 2026 (USD)



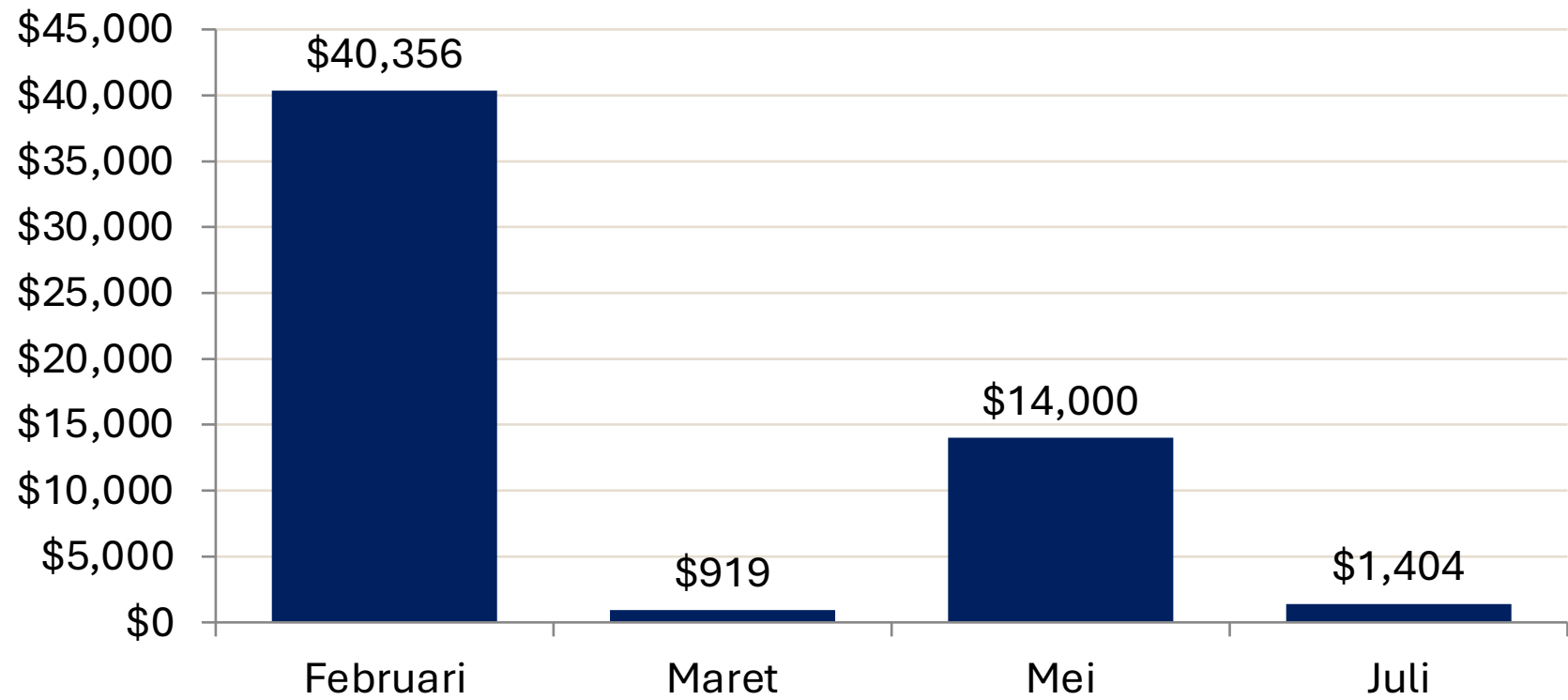
- Ekspor beras Indonesia Januari-Juli 2026 masih sangat terkonsentrasi pada Malaysia dan Arab Saudi yang menyerap sekitar 99,1% volume dan 96% nilai ekspor dari empat negara tujuan. Kondisi ini menunjukkan basis pasar ekspor yang masih sempit dan rentan terhadap perubahan permintaan maupun kebijakan perdagangan kedua negara. Dalam konteks swasembada beras, konsentrasi pasar perlu dikelola secara hati-hati agar ekspansi ekspor tidak menciptakan ketergantungan eksternal baru.
- Pencapaian swasembada membuka peluang untuk menggeser strategi dari *volume-oriented* menuju *value-oriented export*. Ketika kebutuhan domestik dan cadangan beras telah terjamin, surplus yang tersedia dapat diarahkan ke pasar ekspor bernilai lebih tinggi. Diversifikasi tidak sekadar menambah negara tujuan tetapi membidik pasar premium melalui pengembangan beras berkualitas, pemenuhan standar dan sertifikasi internasional, *branding*, serta penguatan daya saing produk.
- Tantangan ke depan adalah mengubah surplus beras menjadi nilai ekonomi yang lebih tinggi. Strateginya bukan semata-mata meningkatkan volume ekspor tetapi meningkatkan nilai per unit, kualitas, pengolahan dan diversifikasi produk, serta diversifikasi pasar dengan tetap menjaga tiga sasaran utama, yaitu kecukupan pasokan, keterjangkauan harga, dan stabilitas harga beras domestik.

Kinerja Ekspor Beras: Konsentrasi Komoditas dan Ketidakberlanjutan Perdagangan

Kontribusi tiap Varian Beras terhadap Total Nilai Ekspor Januari-Juli 2026



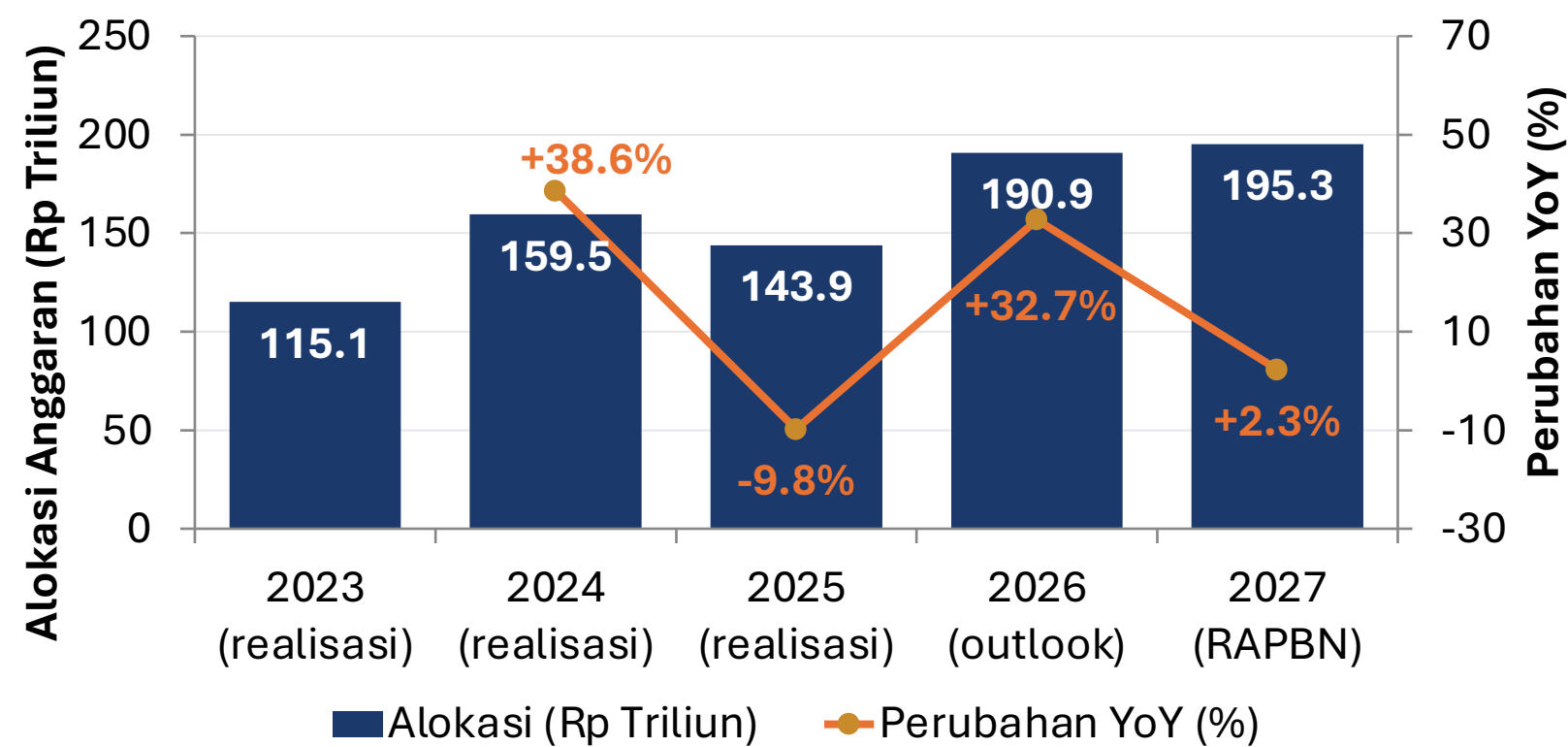
Ekspor Beras Tercatat Hanya pada Empat Bulan Sepanjang Januari-Juli 2026



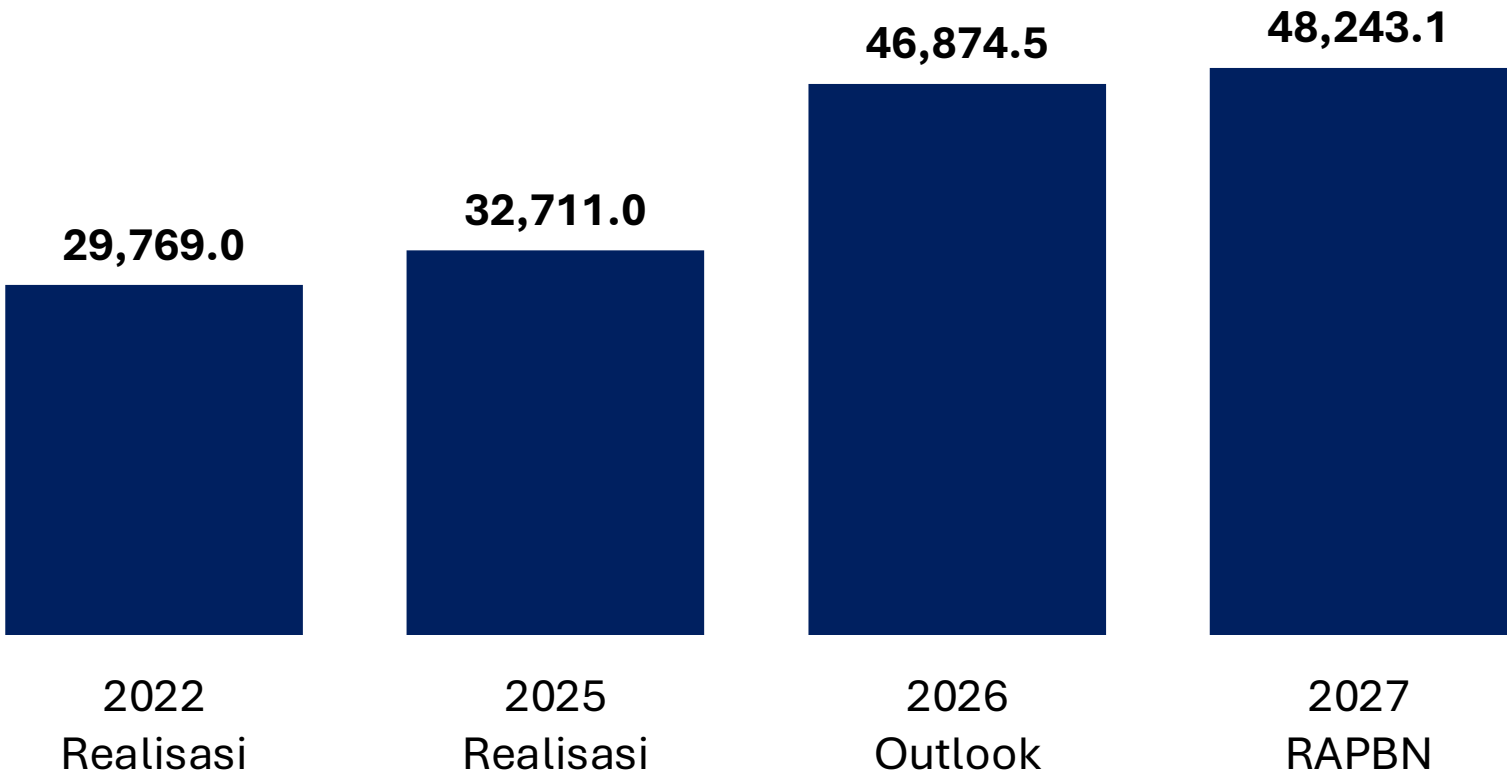
- Ekspor beras Indonesia pada Januari-Juli 2026 masih terbatas dan episodik. Dari tujuh bulan sepanjang 2026, ekspor hanya tercatat pada Februari, Maret, Mei, dan Juli dengan total nilai sekitar US\$56,7 ribu. Pola ini menunjukkan bahwa produksi domestik belum secara konsisten menghasilkan surplus yang dapat dialokasikan untuk pasar ekspor karena prioritas utama tetap menjamin kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan nasional dalam rangka mencapai dan mempertahankan swasembada.
- Struktur ekspor masih sangat terkonsentrasi pada tiga jenis beras, yaitu beras ketan sebesar 43,6%, beras wangi lainnya 31,6%, dan beras semi giling lainnya 24,8%. Kondisi ini menunjukkan bahwa ekspor belum ditopang portofolio produk yang luas dan masih terbatas pada segmen tertentu. Pencapaian swasembada perlu diikuti diversifikasi produk agar surplus produksi dapat dikonversi menjadi ekspor bernilai tambah.
- Kinerja ekspor juga menunjukkan volatilitas yang tinggi. Februari menjadi *outlier* dengan nilai US\$40,36 ribu atau sekitar 71% dari total ekspor Januari-Juli 2026. Setelah mengalami kontraksi pada Maret 2026, ekspor kembali meningkat menjadi sekitar US\$14 ribu pada Mei 2026, kemudian turun tajam menjadi hanya US\$1,4 ribu pada Juli 2026. Fluktuasi tersebut mengindikasikan belum terbentuknya basis permintaan dan kontrak pasokan ekspor yang berkesinambungan.
- Tantangan kebijakan pascaswasembada bukan sekadar meningkatkan volume ekspor tetapi membangun ekosistem ekspor yang berkelanjutan. Hal ini mencakup pembentukan surplus beras yang konsisten setelah kebutuhan domestik dan cadangan terpenuhi, standardisasi mutu, kontinuitas pasokan, diversifikasi produk dan pasar, serta penguatan kontrak perdagangan jangka menengah-panjang. Ekspansi ekspor tetap perlu dilakukan secara selektif agar tidak mengganggu ketersediaan stok dan stabilitas harga beras domestik.

Dari Ekspansi Anggaran Menuju Efektivitas Ketahanan Pangan

Tren Anggaran Ketahanan Pangan 2023–2027



Alokasi Anggaran Subsidi Pupuk (Rp Miliar)



- Anggaran ketahanan pangan menunjukkan penguatan fiskal tetapi belum linier, yaitu naik 38,6% pada 2024, terkoreksi 9,8% pada 2025, lalu melonjak 32,7% pada 2026 menjadi Rp190,9 triliun. Pada 2027, anggaran kembali meningkat menjadi Rp195,3 triliun, tetapi pertumbuhannya melambat menjadi 2,3%. Perlambatan ini mengindikasikan fase konsolidasi setelah ekspansi besar pada 2026. Namun, konsolidasi fiskal perlu dilakukan secara hati-hati karena risiko inflasi pangan masih meningkat, sementara pasar global menghadapi risiko tekanan pasokan dan kelangkaan pupuk yang dapat mendorong kenaikan biaya produksi serta harga pangan domestik.
- Pada sisi input produksi, subsidi pupuk meningkat signifikan dari Rp32,7 triliun pada 2025 menjadi Rp46,9 triliun pada 2026 dan Rp48,2 triliun pada 2027 atau naik sekitar 47,5% dalam dua tahun. Peningkatan ini menunjukkan pergeseran penekanan kebijakan ke pengamanan biaya produksi dan ketahanan input strategis, terutama ketika risiko kelangkaan pupuk global berpotensi meningkatkan harga dan mengganggu ketersediaan pupuk domestik. Subsidi pupuk tidak hanya berfungsi sebagai dukungan bagi petani, tetapi juga sebagai instrumen mitigasi tekanan biaya (*cost-push inflation*) pangan. Namun, tambahan anggaran belum otomatis meningkatkan produksi apabila persoalan ketepatan sasaran, distribusi, kualitas pupuk, irigasi, dan pascapanen belum diselesaikan.
- Tantangan kebijakan kini bukan sekadar memperbesar anggaran tetapi memastikan belanja mampu meredam transmisi guncangan global ke harga pangan domestik. Efektivitas fiskal perlu diukur dari kemampuannya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan input produksi, meningkatkan produktivitas, menambah produksi pangan, serta menjaga pendapatan petani sekaligus mengendalikan volatilitas harga. Kenaikan anggaran ketahanan pangan dan subsidi pupuk harus diarahkan tidak hanya sebagai kebijakan produksi tetapi sebagai bagian dari strategi preventif menghadapi risiko inflasi pangan dan gangguan pasokan pupuk global. Evaluasi perlu berbasis *output* dan *outcome* secara terukur dan konsisten, bukan semata-mata berdasarkan besarnya alokasi anggaran.

Tentang INDEF

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) adalah lembaga riset independen di bidang ekonomi dan keuangan yang didirikan pada Agustus 1995 di Jakarta.

INDEF melakukan penelitian dan kajian kebijakan yang mencakup berbagai isu ekonomi dan keuangan, serta mendorong partisipasi dan kesadaran publik dalam proses pengambilan keputusan.

Kami juga berkontribusi dalam merumuskan solusi yang layak bagi berbagai permasalahan ekonomi dan sosial yang kompleks di Indonesia.

Kantor INDEF:

Jl. Batu Merah No.45, Pejaten Timur, Jakarta Selatan 12510

Telp. 021-7901001, Fax. 021-79194018

Email: indef@indef.or.id | Website: www.indef.or.id

